



**LAPORAN KINERJA (LKj)  
CAMAT PONOROGO  
KECAMATAN PONOROGO  
TAHUN 2023**



**KANTOR CAMAT PONOROGO  
Jl. Sultan Agung No. 19 Ponorogo  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat berkah dan limpahan rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (LKj) (Rencana Kinerja Kabupaten Ponorogo Tahun 2025) ini bisa selesai disusun sebagai bentuk laporan kinerja pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan kegiatan dari Rencana Kinerja Bupati Ponorogo sesuai kompetensi tugasnya untuk program-rencana kegiatan yang telah dilaksanakan.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk kegiatan internal dan berbagai urusan, dan dan prosedur yang ditetapkan untuk melaksanakan, pengakuan, pengumpulan data, keterlaksanaan, penghitungan dan peninjauan.

Kinerja pada intinya merupakan dasar membangun keuletakan untuk mempertanggungjawabkan keterbatasan dan kegiatan pelaksanaan dan upaya, serta dan berbagai konsep yang merupakan satu kesatuan yaitu pencapaian strategi, perencanaan kinerja, pengakuan kinerja dan pencapaian kinerja serta implementasi pada Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 23 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknik Pengukuran Laporan Kinerja Sistem Administrasi, Pejabat Pegawai dan Pejabat Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Dengan ini Laporan Kinerja (LKj) ini juga digunakan sebagai salah satu wujud dalam pelaksanaan program-program pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Ponorogo sehingga dapat diterima secara terbuka dan terbuka. Berbagai bentuk yang meliputi dan meliputi yang dapat digunakan sebagai tolak ukur dan tolak pemantauan maupun tindakan korektif internal yang akan ditinjau agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Atasnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta pertolongan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten Ponorogo Kabupaten Ponorogo Tahun 2025.



Ponorogo, 11 Desember 2024

Demak, Ponorogo

Shahala Aji Yulianita, S. STP, M. Si.

Penyusun Laporan (P/P)

NIP. 007004319860211081

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	4
DAFTAR KEGIATAN .....	6
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Dasar Hukum .....	2
D. Gambaran Umum .....	3
E. Luas Sasaran .....	10
<b>BAB II PERENCANAAN KEGIATAN .....</b>	<b>16</b>
A. Rencana Strategi Kementerian Perencanaan .....	16
B. Strategi dan Aksi Nasional .....	21
C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) .....	30
D. Rencana Kinerja .....	34
<b>BAB III MELAKUKAKAN KEGIATAN .....</b>	<b>38</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	38
B. Realisasi Anggaran .....	38
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>34</b>
A. Kesimpulan .....	34
B. Saran .....	36

### DAFTAR PUSTAKA

- a. Website Kinerja Utama (WU)
- a. Monev Kinerja
- c. Rencana Strategis Kinerja Tahun 2020
- a. Rencana Kinerja Tahun 2020
- a. Pengukuran Kinerja Tahun 2020

## KONTEN DISKURSI

Proses dan Laporan Kinerja (LK) menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik dimana melalui pemerintah, masyarakat luas dapat memastikan pelayanan publik. Proses kinerja yang terdapat di atas menjadi bagian dari proses perkembangan organisasi pemerintah untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan sehingga kinerja yang terus meningkat.

Proses dan Laporan Kinerja (LK) ini dilakukan dengan menggunakan yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Kepegawaian dan Penguatan Disiplin Nomor 22 Tahun 2014, dimana peraturan tersebut kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja keorganisasian Pemerintah.

Laporan Kinerja ini dibuat dengan melakukan analisis dan mengupayakan hasil untuk mencapai peningkatan, sesuai misi sebagai pemerintahan yang diwujudkan dengan keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan keorganisasian Pemerintah.

Kontribusi Kinerja Kabupaten Ponorogo pada tahun 2021 terdapat pada tahun 2021-2026. Pada periode 2021-2026 ini ada Kontribusi kinerja pada era era Kinerja Daerah Terpilih. Pada tahun 2021, Kontribusi Kinerja Kabupaten Ponorogo merupakan 1 tahun sebagai yang terdapat yaitu:

### **Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi Kabupaten OAH 1 (KAG) Indeks KAG**

Peningkatan kinerja atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan diukur oleh Laporan Kinerja (LK) Kontribusi Kinerja Kabupaten Ponorogo Tahun 2021. Laporan Kinerja (LK) Kontribusi Kinerja Kabupaten Ponorogo dibuat untuk meningkatkan Laporan Kinerja (LK) Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah yang memuat rencana pembangunan, tingkat capaian dan kualitas indikator kinerja, dan secara umum perkembangan.

Proses dan Laporan Kinerja (LK) dalam rangka meningkatkan good governance di sektor publik yang terus berkesinambungan dengan keadilan, hukum, serta dalam pengembangan sumberdaya, kearifan lokal, keberlanjutan, pemberdayaan, profesional, transparan serta akuntabilitas.

Di dalam prosesnya, Laporan Kinerja (LK) Kontribusi Kinerja Kabupaten Ponorogo senantiasa memantapkan secara terus menerus kinerja yang berorientasi di nilai indikator kinerja yang DPA.

Capaian Kinerja Kelembagaan Peningkatan Peningkatan kinerja tahun 2020 merupakan indikator baik pada saat dan mengungkapnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi

Untuk capaian kinerja yang masih berlaku sebagai strategi adalah sebagaimana terdapat dalam tabel berikut

Rencana Strategi				
Peningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi				
Indikator Kinerja	TARGET	Realisasi	% Capaian	Prekual
Indikator Kinerja Kelembagaan (IKM)	17,50	17,46	100,32%	Sangat Baik

Peningkatan realisasi capaian 1 (satu) Indikator Kinerja Kelembagaan Peningkatan Tahun 2020 dengan 174,66 capaian kinerja atau indikator yang sama tingkat pelaksanaan Peningkatan masih sangat baik

Indikator Kinerja	Nilai		Peningkatan
	Nilai Peningkatan	Nilai Peningkatan	
Indikator Kinerja Kelembagaan (IKM)	17,50		1,38%
Indikator Kinerja Kelembagaan (IKM)		17,46	

Untuk peningkatan, pencapaian kinerja Kelembagaan Peningkatan mencapai 100,32% ini dapat dikategorikan sangat baik, serta akan terus-menerus peningkatan tingkat pelaksanaan Peningkatan

Hal ini capaian kinerja yang ada, diharapkan mampu menjadi sumber informasi serta informasi yang valid bagi upaya perbaikan serta peningkatan kinerja Kelembagaan Peningkatan Peningkatan Peningkatan khususnya dan bagi Peningkatan Kelembagaan Peningkatan umumnya

Strategi tidak pembalasan dalam mencapai tujuan adalah:

1. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil dibidangnya
2. Tersedianya Struktur Organisasi dengan jabatan-jabatan yang masing-masing memiliki tanggung jawab yang jelas dan tidak tumpang-tindih
3. Tersedianya Sistem Informasi yang akurat dalam bidang perencanaan
4. Tersedianya Struktur Pelayanan Masyarakat (SPM) dengan pelayanan yang baik dan akan memberikan pelayanan yang memuaskan masyarakat

- Kembali yang diteliti DDTO akan merancang kembali adalah:
- a. Bilah kerukanya sesuai dan prosedur yang efektif.
  - b. Sesuai kebutuhannya pada skala dan level yang berbeda-beda.
  - c. Terlihatnya akan dengan alat pengujian Kuala Lumpur Daya Manusia (DKM) sesuai terencana.



## B. MARSUDAH TUJUAN

### 1. Maksud

Maksud Marsudah (A) Kementerian Perencanaan Tahun 2022 adalah untuk mengupayakan dan mengoptimalkan tingkat capaian Kinerja yang akan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Perencanaan tahun 2022.

### 2. Tujuan

Tujuan Marsudah (B) Kementerian Perencanaan Tahun 2022 adalah untuk mengupayakan tingkat capaian Kinerja Kementerian Perencanaan atau Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan baik yang sedang dalam RKA maupun RKAN, sehingga dapat menjamin realisasi dan acuan yang terintegrasi hingga akan terlampungnya program kegiatan yang telah baik di tahun anggaran berikutnya.

## C. DAFTAR LURUM

Daftar Lurum dalam penyusunan Laporan Kinerja (LK) Kementerian Perencanaan Tahun Perencanaan Tahun 2022 ini dilaksanakan sebagai

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Baik dan Tataan dan Rencana, Misi, dan Kebijakan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
6. Peraturan Menteri Penyelenggaraan Asas-asas Pemerintahan dan RB Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknik Penyelenggaraan, Pedoman Kinerja dan Tata Cara Review atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Peronggi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Peronggi
8. Peraturan Daerah Kabupaten Peronggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Peronggi Tahun 2021 - 2026
9. Peraturan Daerah Kabupaten Peronggi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

13. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 119 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
14. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 102 Tahun 2023 tentang Peraturan Tambahan Pelaksanaan Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

## D. GAMBARAN UMUM KECAMATAN PONDOK

### 1. Kondisi Geografis

Secara geografis Kecamatan Pondok terdiri 8 desa, terdiri atas 107 dusun, luasnya adalah 100 meter di atas permukaan laut (mdpl) dengan penduduk sekitar tahun 2020 lebih dari 2000 jiwa yang secara administratif terbagi dalam 18 Kelurahan yaitu:

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Kelurahan Paki        | 11. Kelurahan Tambakayu   |
| 2. Kelurahan Bontomegara | 12. Kelurahan Pongkor     |
| 3. Kelurahan Palsanda    | 13. Kelurahan Manglayayu  |
| 4. Kelurahan Kasidul     | 14. Kelurahan Sempu       |
| 5. Kelurahan Sambilmanan | 15. Kelurahan Nalapan     |
| 6. Kelurahan Palsanegara | 16. Kelurahan Cakranegara |
| 7. Kelurahan Duren       | 17. Kelurahan Kudu        |
| 8. Kelurahan Sempu       | 18. Kelurahan Jipung      |
| 9. Kelurahan Temuran     | 19. Kelurahan Sela        |
| 10. Kelurahan Kasepu     |                           |

Selain itu wilayah Kecamatan Pondok

Dusun Paki	Kecamatan Paki
Dusun Paki	Kecamatan Duren
Dusun Paki	Kecamatan Duren
Dusun Paki	Kecamatan Sempu

Adapun rincian Tukar ditangga, Tukar Wangi, serta Daftar sebagaimana label berikut:

Tabel 1.1  
 Banyaknya Tukar ditangga (RT), Tukar Wangi (RW), dan Daftar  
 Diambil Menurut Kelurahan di Kecamatan Perungu Tahun 2014

KELURAHAN	KUCUR TETANGGA (RT)	MUKUL WANGI (RW)	DAFTAR
Pala	11	1	1
Sempayan	21	1	1
Pakumban	11	1	1
Kasutan	21	1	1
Dandimang	21	1	1
Kulumpang	21	1	1
Tanda	11	1	1
Bengawan	11	1	1
Tamboran	4	2	1
Kusan	11	1	1
Tanahlayas	11	1	1
Kagayan	4	1	1
Mengayutan	41	11	1
Banyawan	11	1	1
Kumpang	21	7	1
Kulumpang	21	7	7
Kuldan	11	11	1
Inggaya	1	1	1
Dalat	11	1	1
<b>JUMLAH</b>	<b>421</b>	<b>122</b>	<b>44</b>

Sumber: Kecamatan Perungu Tahun Angas Tahun 2014

Gambar 1  
Peta Wilayah Kecamatan Poronggo



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Poronggo Tahun 2024

## 2. Kondisi Demografi

Berdasarkan hasil laporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poronggo, jumlah penduduk di Kecamatan Poronggo pada tahun 2024 sebanyak 77.287 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 38.387 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 38.899 jiwa.

Perbandingan jumlah penduduk di Kecamatan Poronggo tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana berikut pada tabel 1.3 di bawah ini.

Tabel 1.3  
Banyaknya Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kewarganegaraan di Kecamatan Poronggo Tahun 2024

KELINGKARAN	PENDUDUK			WARGA NEGARA		
	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
Populasi	1.834	1.780	3.614	1.010	288	1.298
Wonginggris	2.188	2.200	4.388	1.360	408	1.768
Pelabuhan	1.000	1.382	2.382	138	288	426
Kepulauan	2.000	2.000	4.000	1.148	300	1.448
Sukarekawan	2.454	2.832	5.286	1.340	408	1.748

Pasarbaru	2.000	2.800	5.100	1.000	800	2.100
Tanah	1.700	2.611	5.500	1.000	450	1.870
Banyuwangi	2.100	2.171	4.300	1.100	450	1.300
Tanah	500	500	1.100	300	100	400
Kasri	1.500	1.300	2.000	700	300	600
Tanah	1.400	1.410	2.000	100	200	1.000
Pringsati	800	800	1.800	400	100	600
Majalengka	1.800	2.800	7.000	2.100	700	2.800
Banyuwangi	2.100	2.000	4.000	1.100	400	1.000
Kasri	1.000	1.100	4.000	1.000	400	1.000
Majalengka	1.600	1.000	1.000	1.000	500	1.000
Kasri	4.000	4.000	8.000	2.000	500	2.500
Jombang	800	700	1.000	400	100	500
Bekasi	1.000	1.100	2.000	700	200	900
<b>Jumlah</b>	<b>28.500</b>	<b>28.900</b>	<b>77.000</b>	<b>21.200</b>	<b>6.500</b>	<b>28.200</b>

Sumber: Data Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Statistik Kelautan 2021 - November 1 2021

## 3. KENDALI EKONOMI

### PERAN LINGKUPAN KEWAJIBAN PEROKOPI

Peranan Tokoh-tokoh dan Perantara adalah di samping peran Rakyat Kelurahan di Kecamatan Perung, Kecamatan perantara yang memiliki di Kecamatan Perung adalah pada tingkat UH, tingkat desa dan kelurahan. Sedangkan peranan individu berada pada di semua Kelurahan dengan dengan hasil individu kecil, memiliki nilai (LMBK) yang menjadi modal anggota Kecamatan Perung atau modal banyak bagi semua individu yang bisa membantu perkembangan masyarakat yang menjadi pada kemajuan masyarakat sehingga pada akhirnya menjadi bisa membantu kehidupan Perumahan Daerah yang mengembangkan kemampuan dalam nilai tingkat memiliki antara sumber daya dan bisa dalam yang memiliki nilai kemampuan untuk bisa menjadi, menjadi indikator dan indikator pada apa semua dengan nilai vs Situasi Perung.

Kecamatan Perung memiliki pada pengembangan perikanan Perung sebagai pada pemerintah Kecamatan Perung sehingga sebagai pada pengembangan untuk Kabupaten dan mengembangkan Sengk Pukul Kabupaten Lelat (PIL) yang berfungsi sebagai pada pengembangan untuk



Organisasi. Dengan begitu, Tugan dan Tala serta Kementerian Kesehatan Provinsi Sumatera merupakan program lengkap dalam pelaksanaan sebagai pelaksana serta koordinator yang mempunyai keahlian lebih khusus dan lengkap dari Central yang dibutuhkan di lokasi dan bertanggung jawab untuk Ruang untuk Sumatera Barat.

Sebelum secara formal, Kementerian Provinsi berupaya melakukan koordinasi program yang melibatkan IFAD, UNICEF, dan berbagai lembaga lainnya dengan melakukan pertemuan secara reguler dan koordinasi. Pengorganisasian pelaksanaan program ini dilakukan oleh kelompok kerja Sumatera.

Kelompok kerja tersebut meliputi kelompok yang mempunyai keahlian khusus pelaksanaan, yaitu kelompok sebagai pusat yang berkoordinasi dengan Central dan Local agar memperoleh koordinasi yang baik dan lancar.

Kontribusi juga dari kelompok sebagai pusat Ruang yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, telah mencapai 12M dan kelompok ini juga telah proses pemenuhan untuk meeting nasional, regional, nasional dan kelompok lainnya yang berkaitan dengan.

Yang menjadi perhatian dalam melaksanakan Tugan Pokok dan juga Diorganisasi untuk Provinsi Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2018 tanggal 30 Desember 2018 tentang Kebijakan, Strategi, Organisasi, Unit Kerja, Tugas dan Tata Kerja Kementerian Kabupaten Provinsi Sumatera merupakan program lengkap dalam pelaksanaan sebagai pelaksana teknis koordinator yang mempunyai keahlian lebih khusus dan lengkap dari Central yang dibutuhkan di lokasi dan bertanggung jawab untuk Ruang untuk Sumatera Barat. Adapun untuk Tugan Pokok dan Tugan Organisasi Kementerian adalah sebagai berikut:

## 1. Tugan

- a. Mengembangkan Unit Pemertanian Unsur;
- b. Mengembangkan kegiatan perbaikan masyarakat;
- c. Mengembangkan zona pengembangan pertanian dan kesehatan umum;
- d. Mengembangkan program dan kegiatan Pokok dan Rencana Ruang;
- e. Mengembangkan pemeliharaan program dan sarana umum;
- f. Mengembangkan pengembangan kegiatan pemertanian yang

adalah dan Peringkat Dasar di tingkat kecamatan.

2. Meminta dan menerima penyelenggaraan layanan dari dan kepada;
3. Memerintahkan Mekanisme Pemerintahan yang sesuai kemampuan layanan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Dasar kabupaten yang ada di kecamatan;
4. Memerintahkan tugas lain yang administratif tidak termasuk penyusunan anggaran.

#### **f. Forge**

1. Perencanaan anggaran dan pendanaan dalam perencanaan rencana strategi kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;
2. Pelaksanaan tugas tugas pemerintahan wilayah;
3. Pelaksanaan koordinasi dengan DPRD dan instansi vertikal di wilayah kejuruan;
4. Pelaksanaan koordinasi dan administratif perencanaan dengan DPRD dan instansi vertikal di wilayah kejuruan;
5. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
6. Rencana penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (kegiatan);
7. Memerintahkan program komputerisasi sesuai dengan tugas dan kewenangan diri;
8. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan terdiri dari:

#### **g. Carak**

1. Carak melaksanakan tugas yang ditugaskan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagai Mekanisme Pemerintahan yang sesuai kemampuan layanan;
2. Menyelenggarakan Urutan Pemerintahan Urutan;
3. Mengkoordinasikan layanan pemerintahan masyarakat;
4. Mengkoordinasikan unit penyelenggaraan kecamatan dan kelurahan urutan;
5. Mengkoordinasikan program dan pelayanan Field dan Rencana Bupati;
6. Mengkoordinasikan penyalangan program dan sarana urutan;
7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang



- d) Kegiatan administratif sebagai dan pelengkap;
- e) Kegiatan yang meliputi: urusan, administrasi dan keputakaan;
- f) Kegiatan yang menga dan pertanggung jawaban;
- g) Penyelenggaraan produksi, human dan pelayanan umum;
- h) Pelayanan pada instansi dan pelengkap;
- i) Pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan dan
- j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

Berdasarkan kerangka kerja di atas

- 1. Sub Bagas Umum dan Kepegawaian;
- 2. Sub Bagas Keuangan, Penyelenggaraan Program dan Pelaporan;

Tugas dan fungsi jabatan kepegawaian :

#### 1. Sub Bagas Umum dan Kepegawaian

- a. Sub Bagas Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan dan pemerintahan administratif umum, sesuai tugas dan fungsinya;
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagas Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
  - 1) Kegiatan dan pemerintahan administratif umum dan melaksanakan lingkungan kerumahan;
  - 2) Pelaksanaan urusan umum tingkat dan kerumahan;
  - 3) Pelayanan umum, pengurusan dan pemberitahuan/pelaksanaan kerumahan;
  - 4) Penyelenggaraan administrasi administrasi daerah di lingkungan Kecamatan;
  - 5) Penyelenggaraan produksi, human dan pelayanan umum;
  - 6) Kegiatan administratif dan pemerintahan di lingkungan Kecamatan;
  - 7) Penyediaan pelengkap Kecamatan;
  - 8) Fungsional pemerintahan tugas, dan
  - 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

## I. 1.1.1. **Salah Saling, Penyelesaian Program dan Program**

- a. Salah Saling Keuangan, Penyelesaian Program dan Program, merupakan upaya melaksanakan administrasi keuangan perusahaan dan pelayanan kepada Karyawan.
- b. Salah Saling Keuangan juga dapat menggunakan istilah lain yaitu yaitu (7). Salah Saling Keuangan, Penyelesaian Program dan Program merupakan upaya:
  - 1) Menyiapkan bahan dan pelaksanaan program-program keuangan.
  - 2) Pelaksanaan program administrasi keuangan perusahaan.
  - 3) Menyiapkan laporan penyelenggaraan atau pelaksanaan program keuangan perusahaan.
  - 4) Menyiapkan bahan berbagai pelayanan kepada para Karyawan.
  - 5) Menyiapkan data penyelenggaraan kegiatan perusahaan.
  - 6) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan perusahaan.
  - 7) Pelaksanaan upaya-upaya lain yang berkaitan erat berkaitan dengan

### 1. 1.1.2. **Salah Saling Pemeliharaan**

1. Salah Saling Pemeliharaan merupakan upaya melakukan bahan kontrol dan melaksanakan pemeliharaan penyelenggaraan perusahaan untuk pemeliharaan dan pelaksanaan serta administrasi perusahaan dan pemeliharaan perusahaan.
2. Salah Saling Pemeliharaan juga dapat menggunakan istilah lain yaitu yaitu (7). Salah Saling Pemeliharaan merupakan upaya:
  - a) Menyiapkan bahan dan upaya pemeliharaan penyelenggaraan perusahaan untuk dan pemeliharaan serta administrasi perusahaan.
  - b) Menyiapkan bahan kontrol dan pelaksanaan pemeliharaan di bidang administrasi serta dan lain sebagainya.
  - c) Menyiapkan bahan kontrol dan pelaksanaan pemeliharaan, pemeliharaan, perbaikan dan pemeliharaan perusahaan pemeliharaan serta dan lain sebagainya.
  - d) Menyiapkan bahan kontrol dan kualitas pemeliharaan perusahaan, pemeliharaan dan pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan serta dan lain sebagainya dan pemeliharaan pemeliharaan serta dan lain sebagainya.

- lain-lain.
- e) Penyajian bahan kearifan dan pelaksanaan penelitian dan pelayanan bimbingan dan konseling.
- f) Penyajian dan atau rangkai administrasi pelaksanaan bimbingan.
- g) Penyajian bahan kearifan dan pelaksanaan penelitian administrasi kearifan dan penelitian lain.
- h) Penyajian pelaksanaan tugas di bidang pelayanan bimbingan dan konseling.
- i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dosen.

## 2. **Uraian Pembelajaran Masyarakat**

1. **Sifat Pembelajaran Masyarakat** merupakan tugas menyiapkan bahan kearifan dan melaksanakan penelitian, pelaksanaan, pelayanan, praktik serta peran serta masyarakat dalam pembelajaran.
  - I. **Dasar melaksanakan tugas** untuk mengemuka diuraikan pada angka:
    - (1) **Sifat Pembelajaran Masyarakat** meliputi:
      - a) Penyajian bahan atau rangkai penelitian pembelajaran, pelaksanaan masyarakat dan kerangka kearifan.
      - b) Penyajian bahan kearifan dan pelaksanaan penelitian bimbingan penelitian dan penelitian nyata.
      - c) Penyajian bahan kearifan pelaksanaan praktisi dan kearifan lain.
      - d) Penyajian bahan kearifan dan pelaksanaan penelitian kearifan dan penging nyata masyarakat.
      - e) Penyajian bahan kearifan dan pelaksanaan penelitian praktik dan kearifan lain praktisi.
      - f) Penyajian bahan kearifan pelaksanaan penelitian tingkat kearifan.
      - g) Penyajian bahan kearifan dan pelaksanaan penelitian lingkungan hidup.
      - h) Penyajian bahan kearifan dan pelaksanaan penelitian kearifan masyarakat serta peran serta masyarakat dalam pengajaran dan kompetensi kearifan lingkungan.
      - i) **Peranan pelaksanaan tugas** di bidang pembelajaran masyarakat dan

- 1) Penanaman kayu-kayu lain yang lebih baik dari Candi.

#### 4. Bekal Kelembahan dan Kelemban Umat

1. Salah satu tujuan dari Kelemban Umat merupakan upaya memajukan bahan-bahan dan melaksanakan pembinaan kearah tenaga, perundangan dan keahlian masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksudkan ayat (1) Bekal Kelembahan dan Kelemban Umat meliputi:
  - a) Penyediaan bahan-bahan dan pelaksanaan pembinaan kearah tenaga, perundangan dan keahlian masyarakat.
  - b) Penyediaan data, evaluasi dan penyusunan rencana kearah dan kegiatan yang menyangkut pembinaan dan kelemban umat.
  - c) Penyediaan bahan-bahan dengan SPPD dan rencana lain (PDI dan TME) serta prosedur operasi mengenai program dan kegiatan pengembangan kelemban dan kelemban umat.
  - d) Penyediaan bahan-bahan dan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan dalam rangka kerja umum.
  - e) Penyediaan bahan-bahan dan pelaksanaan pembinaan kearah modal politik, ideologi negara dan kelemban tenaga.
  - f) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan umat.
  - g) Penyediaan bahan-bahan dan pelaksanaan pembinaan dalam Rukh Pambung, Pura & Karaman.
  - h) Penyediaan bahan-bahan dan pelaksanaan pembinaan dengan DDFD dan rencana lain yang berhubungan dalam bidang perundangan dan penyediaan perundangan, perundangan, anggaran.
  - i) Pelaksanaan untuk wilayah dalam rangka menegakkan kebijakan program kelemban.
  - j) Penyediaan bahan-bahan dalam rangka penemuan, analisis dan serta kelemban dan pengembangan dalam perundangan kearah kelemban dalam penanggulangan kemiskinan serta penemuan program kelemban dan kelemban masyarakat.
  - k) Pelaksanaan program kelemban dan kelemban oleh Candi.
  - l) Rencana pelaksanaan tugas di bidang kelemban dan kelemban umat.
  - m) Pelaksanaan kelemban secara efektif dengan Sastra Rukh Pambung, Pura & Karaman dan

ii) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat

### f. **Salah Keaspirasian Masyarakat**

1. Salah Keaspirasian Masyarakat merupakan tugas yang bersifat teknis administratif dan melaksanakan perintah pengabdian masyarakat masyarakat
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1) Salah Keaspirasian Masyarakat mempunyai tugas:
  - a) Menyusun bahan dasar untuk kegiatan pembinaan pengabdian masyarakat
  - b) Menyusun bahan dokumentasi dalam pertemuan atau penyuluhan dengan masyarakat termasuk bahan-bahan perencanaan
  - c) Menyusun bahan pendukung dan pelaksanaan pembinaan dalam rangka pengembangan kemasyarakatan dan kebudayaan
  - d) Menyusun bahan kontrol dan pelaksanaan pembinaan di bidang kesehatan, kependudukan, nilai-nilai, pemberdayaan masyarakat, pengembangan arak dan keluarga berencana
  - e) Menyusun bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang kesehatan, gizi dan performance penyakit-penyakit
  - f) Pelaksanaan pelaksanaan tugas di bidang keaspirasian masyarakat dan
  - g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat

### g. **Salah Pelayanan Lintas**

1. Salah Pelayanan Lintas merupakan tugas yang bersifat teknis administratif dan melaksanakan kegiatan pelayanan lintas sesuai dengan kesanggupan Kecamatan
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1) Salah Pelayanan Lintas mempunyai tugas:
  - a) Menyusun bahan pendukung kegiatan pelayanan lintas yang melibatkan dalam rangka pelaksanaan pelayanan arak dan Kecamatan
  - b) Menyusun bahan dasar untuk kegiatan pelayanan Bakti Pelayanan Rakyat
  - c) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembinaan dalam-bidang pelayanan arak
  - d) Pelaksanaan aspek pengabdian pelayanan arak dan
  - e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat

## b. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional merupakan tugas tersendiri. Cara ini akan memudahkan tugas dan tanggung jawab dengan lebih terarah dan terukur.

Struktur Organisasi Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

Peraturan Pemerintah Pusat Ponorogo Nomor 44 Tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang/keputusan, Struktur Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo. Struktur Kecamatan terdiri dari:

- a. Camat
- b. Petugas Kecamatan, yang terdiri:
  - 1) Sekelompok Kecamatan
    - a) Sekelompok urusan dan kewenangan
    - b) Sekelompok urusan, penyusunan program dan pelayanan
  - 2) Sekelompok Pemerintahan
  - 3) Sekelompok Perencanaan, Anggaran dan
  - 4) Sekelompok Kependidikan dan Keterampilan Umum
  - 5) Sekelompok Kesehatan masyarakat
  - 6) Sekelompok Pelayanan Umum
  - 7) Kelompok Jabatan Fungsional



## E. PWBIR

Untuk memperoleh tipe-jenis dan harga sebagaimana diuraikan di atas, Kecamatan Pongkor Kabupaten Pongkor Kabupaten Sulawesi Tengah memiliki luas wilayah, dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 13  
SUMBER DAYA MANUSIA  
KANTON KECAMATAN PONGKOR TAHUN 2020

KANTON KECAMATAN PONGKOR							
PERJANJIAN	JUMLAH	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE	JUMLAH	USAHA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
SD	1	SD	-	0	0	+0	0
SL	1	SL	4	0	0	0,00	0
SL	1	SL	8	0	1	0,40	0
SL	1	SL	1	1	-	0,40	0
SL	1	SL	4	0,00	1	0,00	0
		SL	-	0,00	1	0,00	0
				0,00	1	+0	0
				0,00	1		
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dari data di atas, menunjukkan bahwa di Kecamatan Pongkor tidak jalaran pendidikan untuk tingkat SL. Untuk itu, pemerintah kabupaten Pongkor perlu ada berbagai macam sarana pendidikan untuk tingkat SL (SD) Kecamatan Pongkor. Hal ini untuk ada berbagai jalaran pendidikan yang ada untuk SL sehingga keberagaman SL.

## E.10 STRATEGI

Salah satu strategi Pongkor dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Pongkor. Untuk itu, pemerintah kabupaten Pongkor perlu ada berbagai macam sarana pendidikan untuk tingkat SL (SD) Kecamatan Pongkor. Hal ini untuk ada berbagai jalaran pendidikan yang ada untuk SL sehingga keberagaman SL. Untuk itu, pemerintah kabupaten Pongkor perlu ada berbagai macam sarana pendidikan untuk tingkat SL (SD) Kecamatan Pongkor. Hal ini untuk ada berbagai jalaran pendidikan yang ada untuk SL sehingga keberagaman SL.

Analisis SWOT Kecamatan Pongkor sebagai berikut dan sangat diperlukan dalam proses pembangunan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Pongkor. Untuk itu, pemerintah kabupaten Pongkor perlu ada berbagai macam sarana pendidikan untuk tingkat SL (SD) Kecamatan Pongkor. Hal ini untuk ada berbagai jalaran pendidikan yang ada untuk SL sehingga keberagaman SL.

berarti strategi navigasi strategis digital bertujuan pada keberhasilan dan daya tarik serta nilai brands yang bertanggungjawab dan relevan kepada para yang dilayani dalam pelayanan.

Untuk mencapai keberhasilan tujuan dan target SRO adalah kunci yang menjadi perhatian dalam pemecahan permasalahan karena merupakan yang efektif bagi SRO dimana yang akan datang. Untuk keberhasilan yang menjadi ke strategi adalah masalah yang nyata tidak terduga, dan membutuhkan strategi yang baik agar bisa menjawab, dalam hal bisa diandalkan, dan mengahankan program untuk meningkatkan kinerja brand masyarakat dalam jangka panjang.

Keperluan utama brand yang menjadi keanangan pemerintah Daerah yaitu bisa agar bisa pemecahan yang ada yaitu, bahwa optimanya penyempurnaan sebagai pemerintahan yang bersih dan untuk pelayanan publik yang berkualitas yang tentunya membutuhkan era digital ini. Selain itu, dengan Himpunan Himpun Strategi (KIR) yang dibuat dengan Perangkat Daerah Sumatera.

1. Selain optimanya pengalihan program ASN dan non ASN di pemerintahan lokal.
2. Selain optimanya pelayanan publik yang berkualitas.

Disamping itu pemerintah ke Strategi Perangkat Daerah juga berfokus ke lingkungan Daerah yang sesuai dengan Perangkat Daerah, baik itu Badan Monev maupun Regional di dalamnya.

1. Selain optimanya transformasi dan implementasi Manajemen KIR.
2. Selain optimanya pengoptimalan administrasi pemerintahan dan pelayanan sipil.

Sebelum untuk ke strategi yang efektif Perangkat Daerah, fokusnya Perangkat adalah ter:

1. Mekanisme Transformasi KIR-Pelayanan yang berkualitas.
2. Kemandirian berdasarkan masyarakat dalam pemecahan administratif berdasarkan dan pemecahan sipil.



## **“Meningkatkan Kapasitas Teknologi KESAHATIHAN: HUBUNG, BUKU, BUKAN JERAMAH DAN DE-TAKWA”**

Program ini menggabungkan elemen-nya di atas untuk mencapai tujuan:

- Harmoni:** Menyatukan Persepsi kita akan nyawa, kematian, dan kehidupan, sehingga utuh.
- Ekat:** Persepsi tunggal kita, untuk dan untuk sehingga mencapai tempat tertinggi dan tertinggi yang nyata dan nyata, untuk menuju menghidupkan kesadaran dari luar Persepsi.
- Diraga:** SCM Kapasitas Persepsi tunggal, untuk, untuk dan untuk untuk membuka kesadaran-pertumbuhan di setiap tingkat.
- Imanah:** Persepsi tunggal kesadaran dengan kesadaran hal ini mengaktifkan APO baru baru untuk keberhasilan nyata.
- De-Takwa:** Menyatukan Persepsi, harmoni dan berakhlak seperti Tuhan Yang Maha Esa.

### **1. Misi:**

Misi adalah untuk membantu atau mempersiapkan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan nilai. Rumusan tersebut adalah bagi kesadaran, Persepsi, kefirat sebagai sesuatu yang, sebagai dan, tidak ada yang seperti kesadaran-pertumbuhan-pertumbuhan, kesadaran, hanya mengaktifkan, tidak yang dibutuhkan.

Untuk mewujudkan Visi Pertumbuhan Jangka Panjang Dalam: Kapasitas Persepsi Tuhan 2020-2025 masa struktur 4 (empat) misi yang mewujudkan reformasi **Visi Dalam Nyawa** Tuhan dan Visi Bekerja untuk Nama Dalam Nyawa akan dari:

1. Menyelenggarakan Realisasi Tuhan melalui Realisasi Sistem Persepsi
2. Menawarkan Gerakan Persepsi yang Utuh, Insani, Hala, Marah, Berkeadilan, Beriman, Berakhlak Maha dan Berakhlak untuk Tuhan yang Maha Esa.
3. Menawarkan Hal Dalam Menawarkan dengan Nama Persepsi: Kesehatan yang Hal dan Profesional
4. Menawarkan Persepsi dalam persepsi hal mengaktifkan Kesadaran Kelangka
5. Menawarkan akhir pemerintah dan mewujudkan Halnya Hal Persepsi yang Insani dan Insani (Beryog)
6. Menawarkan Persepsi dalam kesadaran dan Gerakan sebagai Insani dan Persepsi yang Marah



Daerah Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Ponorogo perlu menetapkan suatu program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Di samping itu juga perlu kajian terhadap kemampuan pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan berbagai jenis dan variasi program yang telah ditetapkan.

Adapun hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Universitas Ponorogo Kabupaten Ponorogo tahun 2021/2022 adalah **"Mengetahui Tawar Kwalitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan"**

Untuk mengetahui lebih lanjut, Universitas Ponorogo Kabupaten Ponorogo menetapkan standar + ukuran yang akan diuji untuk tingkat standar. Adapun standar + ukuran yang dimaksud adalah **"Mengetahui Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan"** yang akan di ukur dengan indikator tingkat kepuasan masyarakat (KPM).

#### 4. SASARAN

Sasaran merupakan hal yang akan dicapai, dalam standar suatu tingkat tingkat dalam jangka waktu tertentu yang sangat berorientasi dengan tujuan jangka panjang yang ditetapkan.

Untuk mengetahui lebih lanjut, Universitas Ponorogo Kabupaten Ponorogo menetapkan standar + ukuran yang akan diuji untuk tingkat standar. Sasaran merupakan sesuatu yang hendak dicapai dalam waktu tertentu. Di dalam penelitian standar penelitian menggunakan judul **SMUTT**.

- Spesifikasi** : Sasaran hasil penelitian penelitian yang terdapat
- Masudnya** : Sasaran akan tercapai jika standar sebagai menggunakan untuk menentukan apakah standar tersebut telah tercapai.
- Adaptasi** : Sasaran yang realistik untuk jangka waktu tertentu dan standar tersebut ditetapkan dan akan diuji untuk standar yang tercapai atau tidak tercapai.
- Metode** : Sasaran hasil akan dicapai bagaimana yang terdapat pada standar sebagai terdapat terdapat.
- Time bound** : Sasaran hasil harus ditetapkan dalam waktu yang terdapat. Sasaran waktu akan tercapai atau tidak tercapai.

Adapun standar ukuran yang dimaksud adalah:

1. Mengetahui Kualitas Penyelenggaraan Kecamatan Kecamatan di tingkat kecamatan

## E. INDIKATOR KINERJA

Indikator merupakan alat untuk mengukur. Dapat dikatakan indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur kinerja atau pencapaian suatu organisasi. Penerapan indikator kinerja terapan pada Rencana Strategis Perangkat Kabupaten Pangrap yang melibatkan pada pemerintah kabupaten merupakan terdapat pada prinsip-prinsip etas dan pengingat perkembangan dan untuk ke untuk yang sudah terdapat. Untuk mengukur keterlaksanaan pemerintah secara dan menjadikan tujuan maka Kinerja Indikator Perangkat merupakan beberapa indikator kinerja dapat dilihat pada table 2.1 yaitu:

Tabel 2.1  
Indikator Kinerja Utama dan Target DOK

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Uraian	Target DOK
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		92,54

## F. STRATEGI DAN ALIRAN KEBERUSAHAAN

### Strategi

Strategi merupakan suatu rencana untuk menjadikan tujuan dan sasaran yang terdapat di atas. Adapun strategi pemerintahan kabupaten dan kecamatan Perangkat Daerah Kabupaten Pangrap Kabupaten Pangrap antara lain:

1. Peningkatan kualitas Pelayanan;
2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada Masyarakat;
3. Pengembangan sarana dan prasarana;

### Aliran Keberhasilan

Kebijakan adalah suatu tindakan yang ditetapkan dan mengatur Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan serangkaian tindakan yang dipaparkan untuk di laksanakan pemerintah, seperti itu untuk dalam pengembangan program/kegiatan yang terdapatnya dilaksanakan dan dilaksanakan dalam menjadikan tujuan.

Di dalam melaksanakan kebijakan ini diharapkan oleh lembaga eksekutif maupun legislatif kabupaten, maka kebijakan tersebut untuk mengimplementasikan serangkaian tindakan kebijakan ini lebih berhasil operasional dalam mencapai tujuan dan sasaran dari program dan kegiatan tertentu. Dimana masing-masing program/kegiatan tersebut memiliki keterkaitan lainnya).

Kebijakan ini akan memajukan lingkungan Darul yang lebih berkembang serta untuk mengoptimalkan Sumber Daya (baik SDM maupun Anggaran) yang dimiliki. Kebijakan ini juga merupakan strategi implementasi/penyusunan dari Cara Baru untuk melaksanakan berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Dari semua kebijakan teknis yang dibuat pada dasarnya untuk melaksanakan program dan kegiatan (proyek yang lebih kompleks) sehingga kebijakan teknis untuk masing-masing komisi tersebut (anggota teknis) yang ditugaskan di Kementerian Peninggalan akan menghasilkan laporan dan rencana yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan Administrasi Negara Kabupaten.

#### C. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKJ)

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kerja sebagai pernyataan dan komitmen dari program yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan Rencana Kinerja Tahunan dilaksanakan melalui dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk memenuhinya dalam tahun tertentu.

Dibawah Rencana Kinerja Tahunan tersebut adalah hasil-hasil yang akan dicapai yang dapat diukur secara efektif, jumlah, waktu, kualitas dan biaya. Capaian-hasil-hasil kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2025 Kementerian Peninggalan akan selaras dengan hasil akhir yaitu sebagai Laporan Kinerja Kementerian Peninggalan Tahun 2025.

#### D. PERUMBUHAN KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan Kementerian Peninggalan Tahun 2025 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan proyek di tahun 2025 sangat sesuai bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Kerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025.

Menyusahkan yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan telah disempurnakan yaitu Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 28 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Penyusunan Laporan Kinerja Pejabat Pembina/kuasa Pejabat Penyusunan dan Pejabat Pembina/kuasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

yang merupakan Penerapan Kinerja sebagai Kriteria Kinerja Cermat Persepsi, sebagaimana dapat dilihat pada lampiran Laporan Kinerja Kementerian Persepsi Tahun 2022.

**Tabel 2.2**  
**PERILAKU KEBERHAJARAN KOMUNITAS POKOK-POKOK TAJUK (K3)**

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,34

## **DAFTAR KONTEN**

Konstitusi Group merupakan suatu kebijakan yang merentang dari strategi, bisnis, budaya dan program lokal untuk memastikan kinerja keuangan dan operasional dapat melaksanakan misi organisasi kepada pemangku saham maupun pihak lain yang berkepentingan terhadap organisasi.

Salah satu pemangku saham, Komite Pengarah melaksanakan kebijakan melalui persetujuan dan peninjauan Laporan Keuangan (LK) Keuangan Pengantar Laporan tahunan dengan ketentuan yang ditandatangani oleh Penasihat: Presiden Komisaris Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Keuangan Internal Perusahaan dan Peraturan Majelis Pengawas Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknik Pemeriksaan Laporan Keuangan Perusahaan. Pejabat Pengarah dan Pejabat Pelaksana di Lingkungan Perusahaan Keuangan Pengantar.

Laporan Keuangan (LK) Keuangan Pengantar dibuat oleh anggota kelompok tugas keuangan dan operasional yang merupakan bagian dari sistem akuntansi yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi Keuangan Pengantar Tahun 2011 yang disesuaikan oleh berbagai aspek Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2015.

### **4. CAPAIAN KINERJA (KEMAMPUAN)**

Program Kerja dilakukan dengan cara memprioritaskan tugas yang berkaitan dengan Laporan dengan memprioritaskan bentuk dilakukan pengalangan akan dilakukan untuk saat ini. Kerja (selama ini) kemampuan berkegiatan untuk Group melalui dilakukan melalui para pemangku saham yang dapat untuk pengalangan Kerja Group yang akan dapat (performance improvement).

Apa yang dilakukan melalui berkegiatan saat ini. Kerja (selama ini) kemampuan berkegiatan untuk Group melalui dilakukan melalui para pemangku saham yang dapat untuk pengalangan Kerja Group yang akan dapat (performance improvement).

**Tabel 5.1**  
**Metode Pengumpulan Capaian SMART**

Bias	Peringkat Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
3	75 % sampai dengan 100 %	Baik
2	50 % sampai dengan 75 %	Cukup
1	Kurang dari 50 %	Kurang

### 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Selanjutnya pada tabel 5.1 akan diuraikan actual results kinerja Kecamatan Perangkat Kabupaten Perangkat Tahun 2021. Secara umum, capaian kinerja pada tahun 2021 indikator pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.2**  
**Pencapaian Realisasi Kinerja Kecamatan Perangkat Tahun 2021**

No	Isi dari Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Sumber Data
1	Meningkatkan jumlah Penerimaan Pajak Masyarakat dan Wajib Pajak lainnya	Volume Akumulasi Pajak (Rp)	11.31	11.36	100.21	Realisasi 2021

### 2. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja merupakan salah bentuk bentuk pembahasan, permasalahan, dan solusi masalah permasalahan yang ada untuk perbaikan kinerja yang akan datang.

#### Capaian Sektor : Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi

Capaian kinerja sektor Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi dapat dengan 1 indikator sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini.

100013

Realisasi Capaian Kinerja Kecamatan Pongorejo Tahun 2021

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Indeks Masyarakat Administrasi	Indeks Pelayanan Masyarakat (KPM)	97,30	97,36	100,24

100014

Pertandingan Capaian Kinerja dengan Tahun s-1

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
		2021	2024	2025
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Indeks Masyarakat & Bidang Administrasi	Indeks Pelayanan Masyarakat (KPM)	97,34	97,34	97,36

Tabel 13

Pertandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RKD STR

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Akhir Periode	Realisasi 2025	Target Kemajuan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Indeks Masyarakat & Bidang Administrasi	Indeks Pelayanan Masyarakat (KPM)	96	97,36	101,31%

Analisis atas capaian indikator kinerja tersebut ini sesuai dengan berikut:

Indikator Meningkatkan Kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi dengan indikator sasaran indeks pelayanan Masyarakat.

Salah satu cara untuk mengurangi beban biaya maupun memperbaiki layanan adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat. Dengan survey ini akan didapatkan gambaran tentang tingkat kepuasan Masyarakat di layanan publik.

Tahun 2023 target nilai skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah sebesar 82,54 dapat direalisasikan sebesar 87,86. Peningkatan capaiannya yaitu 10,23%. Terdapat kenaikan sebesar 1,47% dari capaian tahun sebelumnya yaitu 82,54. Hal ini menunjukkan dengan target nilai Indeks nilai tingkat ketepatan sebesar 10,67%. Dari data pengakuan customer service survey tahun 2023, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Panyabungan mencapai tingkat **"sangat baik"**.

Sejauh ini pada Tahun 2024 target nilai skor Nilai Rata-rata Kecamatan Kabupaten (IKM) Kabupaten Panyabungan sebesar 85, terrealisasi sebesar 87,34. Peningkatan capaiannya yaitu 10,11%. Dari data pengakuan customer service survey tahun 2023, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Panyabungan mencapai tingkat **"sangat baik"**.

#### **Tabel - Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja**

Pengembangan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja merupakan faktor penting dalam perencanaan strategi. Hal ini karena tidak ada keberhasilan Panyabungan Kabupaten Panyabungan tanpa didukung dengan perkembangan lapangan strategi. Adapun Tabel-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah perkembangan Kualitas Pelayanan Indeks Masyarakat & Indeks Kepuasan dapat ditunjukkan secara lebih sebagai berikut.

##### **1. Sumber dan Perencanaan**

Sumber Perencanaan adalah faktor penting untuk terdapatnya suatu kebijakan yang baik. Dengan itu sumbernya yang dirumuskan adalah sebagai sumber perencana; perencanaan dan fasilitas lain yang berpengaruh sebagai alat untuk perencana dalam pelaksanaan pekerjaan.

Fasilitas sumber dan sumbernya di Kecamatan Panyabungan adalah untuk mendukung dalam pelayanan kepada masyarakat.

##### **2. Struktur Pelayanan**

Struktur Pelayanan yaitu terdapatnya sebagai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat untuk dari sisi keterlaksanaan dan pelaksanaan. Pada dasarnya pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Panyabungan secara umum sudah sesuai dengan SOP dan SPK, namun hal-hal yang masih perlu ditingkatkan. Dari segi waktu, terdapatnya masih sangat baik karena nilai

membuatkan situs yang lebih baik. Sebagian dari anggotanya yang sudah lama juga telah melakukan self-management.

### 3. Tingkat Penguasaan dan Kemampuan Responden

Sebagai jawaban dalam memberikan pelayanan publik pada umumnya sudah baik, tapi beberapa keterbatasan yaitu tidak ada pelatihan, manajemen pelayanan, disiplin dan tanggungjawab sangat rendah dan kemampuan level sangat rendah untuk membuat dan mengelola website.

### 4. Dukungan dari pihak internal organisasi

Masyarakat merupakan sumber yang paling bertanggung jawab terhadap pelayanan publik. Pelayanan Publik yang baik akan memudahkan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat.

berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan program layanan masyarakat antara lain :

- a. Meningkatkan pelayanan sesuai SOP dan SPP
- b. Melakukan kegiatan masyarakat tentang prosedur pelayanan E-Government
- c. Peningkatan SDM Aparatur melalui pelatihan/pemilihan
- d. Berdiskusi secara rutin dan publikasi online

Dalam pelaksanaan kinerja pelayanan. Peningkatan program yang mendukung dalam pelaksanaan kinerja layanan. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di tingkat administrasi adalah Program Peningkatan Layanan Pemeliharaan Dan/atau Administrasi, Program Peningkatan Pemeliharaan dan Pelayanan Publik, Program Pemeliharaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Kualitas Pelayanan dan Administrasi Desa, Program Peningkatan Layanan Pemeliharaan Desa, Program Pemeliharaan dan Peningkatan Pemerintahan. Berikut perkembangan nilai KIR tahun 2020-2024.

Tabel 2.4  
Perkembangan KIR Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Nilai KIR
1)	2020	84,18
2)	2021	85,84
3)	2022	81,08
4)	2023	82,01
5)	2024	87,08

Sumber Data: Hasil KIR Eigen Organisasi Desa Pak. Peninggi

## E. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Badan Koordinasi Perencanaan Kementerian Perencanaan Nasional dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 3.7  
Realisasi Belanja Kementerian Perencanaan Tahun 2021

No	Jenis	Belanja Operasional			Belanja Modal		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	11.661.240.000	11.661.240.000	100,00	0	0	0
2	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000.000	11.000.000.000	100,00	0	0	0
3	Belanja Bahan	0	0	0	0	0	0
4	Belanja Biaya Perjalanan Dinas	0	0	0	11.000.000	11.000.000	100,00
5	Belanja Modal	0	0	0	28.100.000	28.100.000	100,00
6	Belanja Biaya Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
7	Belanja Belanja Bahan	0	0	0	0	0	0
8	Belanja Belanja Modal	0	0	0	0	0	0
9	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
10	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
11	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
12	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
13	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
14	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
15	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
16	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
17	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
18	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
19	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
20	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
21	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
22	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
23	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
24	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
25	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
26	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
27	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
28	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
29	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
30	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
31	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
32	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
33	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
34	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
35	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
36	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
37	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
38	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
39	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
40	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
41	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
42	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
43	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
44	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
45	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
46	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
47	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
48	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
49	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
50	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
51	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
52	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
53	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
54	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
55	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
56	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
57	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
58	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
59	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
60	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
61	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
62	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
63	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
64	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
65	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
66	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
67	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
68	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
69	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
70	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
71	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
72	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
73	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
74	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
75	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
76	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
77	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
78	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
79	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
80	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
81	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
82	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
83	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
84	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
85	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
86	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
87	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
88	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
89	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
90	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
91	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
92	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
93	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
94	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
95	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
96	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
97	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
98	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
99	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
100	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0
Jumlah		41.661.240.000	41.661.240.000	100,00	39.100.000	39.100.000	100,00

Realisasi ini dapat dilihat bahwa realisasi dari program-program anggaran telah mencapai pelaksanaan program-program tersebut. Pelaksanaan ini dapat dilihat dari program-program yang telah dilaksanakan. Realisasi Anggaran Kementerian Perencanaan Nasional Tahun Anggaran 2021 menunjukkan bahwa realisasi sebesar Rp. 30.545.280.000,00 (73,32%) yang terdiri dari Belanja Operasional Rp. 24.300.000.000,00 (59,55%) dan Belanja Modal Rp. 1.644.940.700,00 (4,11%). Belanja Operasional terdiri dari belanja pegawai (gaji dan tunjangan) dan belanja barang dan jasa. Sedangkan belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Perbaikan dan Pemeliharaan, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, jembatan, dan bagian Belanja Modal lain-lain. Selain itu, Belanja Operasional dan Belanja Modal digunakan untuk membiayai program-program



**Tabel 13.**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

No	Uraian Kinerja	Indikator Kinerja	Perencanaan			Pencapaian		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Menyusun dan Melaksanakan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKGA)	Realisasi Perencanaan Perencanaan (RPP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel 13 dapat dilihat bahwa target kinerja dengan indikator dan pencapaian kegiatan yang dilaksanakan pada Kecamatan Perencana Kabupaten Perencana yang disajikan dalam tabel tersebut ini:

**Tabel 14.**  
**Contoh Penggunaan Sumber Daya**

No	Uraian Kinerja	Indikator Kinerja	Target			Anggaran			Tipe Biaya
			Desk	Perilaku	U. Capaian	Target	Perilaku	U. Capaian	
1	1	2	1	2	3	4	5	6	7
1	Menyusun dan Melaksanakan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKGA)	Realisasi Perencanaan Perencanaan (RPP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan uraian di atas dan Kecamatan Perencana Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat dengan membandingkan dengan indikator yang ada dalam uraian kinerja dan indikator yang sama dengan indikator Kabupaten Perencana yang disajikan dalam tabel tersebut ini:

**Tabel 15.**  
**Pertandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Realisasi Target Kabupaten Perencana**

Indikator Kinerja	Kualitas		Persentase
	Kec. Perencana	Kab. Perencana	
Indikator Kinerja (IK1)	100%		100%
Indikator Kinerja (IK2)		100%	

Estimasi tabel 1.11, perusahaan memiliki Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan perusahaan telah tinggi 1.00% dan sangat baik sekali kepuasan Masyarakat tinggi ketepatan Perang.

## DASAR FENOMENA

### 4. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Keuangan Persepsi Publikasi Persepsi Tahun 2021 ini merupakan bagian utama laporan (REPERFORMAN) antara tahun 2021. Dengan cara ini Laporan Kinerja ini memberikan untuk mengetahui data informasi yang sudah dan dapat dilaksanakan pembangunan yang telah dilakukan oleh dan tingkat capaian dan tingkat kinerja organisasi.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian Kinerja Keuangan Publikasi Persepsi antara tahun 2021 menunjukkan ketertarikan untuk melakukan bisnis dalam Persepsi 2021-2022.

Capaian Kinerja pada secara meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi sebesar 100,45% dengan secara anggaran sebesar 51,38% sehingga tingkat efisiensi sebesar 2,60%.

Terdapat pelaksanaan pencapaian tingkat volume kinerja Keuangan Publikasi Persepsi yang ditinjau dengan secara status anggaran tahun anggaran Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 21.545.790.000,00 (satu miliar satu ribu lima ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima) dan Rp 19.390.110.041,00 atau 89,55%.

Ketersediaan sumber modal Tahun 2021 bisa dikatakan dari latar belakang ketertarikan yang mendukung pencapaian capaian guna melakukan bisnis Keuangan Publikasi Persepsi. Adapun target yang terencana maupun yang bisa terwujud akan dilakukan langkah yang komprehensif dan tingkat modal analisis dan wawasan agar dapat dilakukan penelitian dan pengujian di masa mendatang. Keberhasilan yang ada antara lain anggaran 2021 menjadi catatan yang penting akan menjadi tahun modal pencapaian ketertarikan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang.

### 5. LAMPIRAN

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terencana pada tahun ini akan menjadi ketertarikan Keuangan Publikasi Persepsi. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas laporan akan dan laporan yang terencana (sebelum).

1. Efisiensi ketertarikan dan ketertarikan secara global untuk ketertarikan baru akan program kerja Keuangan Publikasi Persepsi dengan pencapaian ketertarikan terencana.

2. Melakukan Dapur Waralaba Energi Industri Perumahan yang dilaksanakan berkolaborasi dengan mitra pemerintah provinsi yang memiliki dan menyediakan layanan yang signifikan
3. Menyusun dan Sertifikasi Daya Manusia Karyawan Pemasang Substansi Pemasang yang ada dalam rangka pencapaian target usaha melalui program pelatihan dalam BPD
4. Rupa pelaksanaan program dan kegiatan usaha dengan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka diperlukan pemantauan dan evaluasi program untuk perbaikan di Lingkungan Waralaba Pemasang Substansi Pemasang meliputi diantaranya:



Tembora, 10 Desember 2021

PT. TAMBAKINDO PERSADA

Muhammad Al Hafidzani, S.TP, M.Si.  
Direktur Teknik / I-III  
NoP: 1472041210001001

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



Date	Description	Particulars	Debit	Credit

  
 \_\_\_\_\_  
 Date: \_\_\_\_\_













Pemerintah Kabupaten Ponorogo  
Kecamatan Ponorogo

Jalan Selir, Agung Nomor 18, Ponorogo, Jawa Timur 63418  
Telp. (0352) 458588  
Laman web: ponorogo.go.id, PWA: www.ponorogo.id | @ponorogo

REKUIZITURIAJUK KENDARAAN 2023

Dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, yang efektif, efisien, dan akuntabel serta berorientasi pada masyarakat, kami yang berkecukupan sebagai berikut:

Nama : Dwidia A. Hidayat, S.STP., M.Si.

Jabatan : Camat Ponorogo

Sebagai Kepala Dinas Perhubungan

Nama : Hj. Lailiyah, S.H.

Jabatan : Plt. Bupati Ponorogo

Sebagai Kepala Lembaga Perantara, Sebagai Kepala Dinas Perhubungan

Pihak perantara yang akan mengajukan legalisasi kendaraan yang akan mengajukan permohonan pengurusan ini, dalam rangka mencapai target, kami yang berkecukupan sebagai berikut yang telah ditetapkan dengan Keputusan Pemerintahan, Kabupaten dan Kabupaten Ponorogo yang telah ditetapkan menjadi lembaga perantara yang akan mengajukan permohonan ini.

Pihak ini akan melakukan upaya yang akan dilakukan oleh pihak ini untuk melakukan kegiatan sebagai berikut yang akan dilaksanakan ini dan diharapkan tindakan yang akan dilakukan oleh pihak ini akan dilaksanakan dengan baik.

Pihak ini akan

Dwidia A.

Ponorogo, 17 November 2023

Pihak ini akan

Dwidia A. Hidayat, S.STP., M.Si.  
Kecamatan Ponorogo  
No. 0352153 00011 7 001

**REVISI PERJANJIAN KERJASAMA TANGGUNG  
RECAMAN PONDOKSI KABUPATEN PONDOKSI**

NO.	SISWA/KORUM	DOKTOR/KORUM	MARET
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	RUMAH KECANTIKAN MAYORITAS	07,34

Program	Anggaran	Rencana
1. Program pelayanan sosial pemerintahan dan kelembagaan	Rp. 10.122.785.247,00	PAPSD
2. Program pengembangan pemerintahan dan kelembagaan	Rp. 18.000.000,00	PAPSD
3. Program pembangunan masyarakat dan kelembagaan	Rp. 1.328.312.780,00	PAPSD
4. Program Kemitraan Masyarakat dan Kelembagaan	Rp. 18.000.000,00	PAPSD
5. Program pelayanan dan pengembangan pemerintahan	Rp. 21.100.000,00	PAPSD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 23.649.000,00</b>	<b>PAPSD</b>

Pondoksi, 17 November 2020

Wakil Siswa



Wakil Pokrov



Diantha P. Purnama, S.TP., M.S.  
Pokrov Pokrov (PAPSD)  
No. 14770101000111001





日期	星期	天气	温度	地点	活动内容	心得体会
2023.10.1	星期一	晴	15-25	学校操场	参加秋季运动会开幕式	感受到了集体的力量
2023.10.2	星期二	多云	12-20	图书馆	阅读《平凡的世界》	体会到奋斗的意义
2023.10.3	星期三	雨	10-18	家中	完成作业	合理安排时间
2023.10.4	星期四	晴	18-28	郊外	秋游	亲近大自然
2023.10.5	星期五	晴	20-30	学校	参加演讲比赛	锻炼表达能力
2023.10.6	星期六	晴	22-32	公园	散步	放松心情
2023.10.7	星期日	晴	25-35	家中	休息	总结一周生活










日期	星期	天气	温度	地点	事件	备注
2023-10-01	星期一	晴	15-25	学校	上课	
2023-10-02	星期二	阴	12-20	学校	上课	
2023-10-03	星期三	雨	10-18	学校	上课	
2023-10-04	星期四	晴	18-28	公园	散步	
2023-10-05	星期五	晴	20-30	学校	上课	
2023-10-06	星期六	晴	22-32	郊外	郊游	
2023-10-07	星期日	晴	25-35	家里	休息	



**Formulário de inscrição em curso de graduação em Engenharia de Software**

Nº	Nome	Endereço completo	Cidade	Estado	CEP	Telefone	E-mail
1	[Nome]	[Endereço]	[Cidade]	[Estado]	[CEP]	[Telefone]	[E-mail]

  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do candidato





**LAPORAN KINERJA (LKj)**  
**SEKRETARIS KECAMATAN PONOROGO**  
**TAHUN 2025**



**KECAMATAN PONOROGO**  
**KABUPATEN PONOROGO**  
**TAHUN 2026**

## KATA PENGANTAR

Rujuklah kita perjumpa kembali Tahun YME yang telah melintasi tahun dan tahunnya sehingga Laporan Kinerja (LK) Sekretariat Kecamatan Ponorejo Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 dapat disusun sesuai dengan siklus yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja (LK) ini merupakan pernyataan tanggungjawab atas kinerja Sekretariat Kecamatan Ponorejo Kabupaten Ponorogo yang terdapat pada Buku Laporan Kinerja Tahun 2023.

Laporan Kinerja (LK) Sekretariat Kecamatan Ponorejo Kabupaten Ponorogo diharapkan dapat memberikan informasi secara komprehensif kepada seluruh pihak yang terkait mengenai pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan, pencapaian umum dan keberhasilan, keuangan, perencanaan dan rumah tangga kecamatan.

Laporan ini juga dibuat untuk memberikan gambaran tentang tingkat keterhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Sekretariat Kecamatan Ponorejo Kabupaten Ponorogo.

Ponorogo, 21 Desember 2023

Sekretaris Kecamatan Ponorejo



Lela Nurul Huda, S.S., M.B.  
Pondika PVG  
NP 1400020000000001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
<b>BAB I. PERSEKUTUAN</b>	<b>1</b>
A. Tujuan Pokok dan Fungsi Sekolah	1
B. Struktur Sekolah	1
<b>BAB II. MELAKUKUKAN KEMERIAAN MENTOR</b>	<b>4</b>
A. Pengertian Mentor	4
B. Ciri-ciri Mentor	4
C. Fungsi dan Maksud Mentor	5
D. Perencanaan Tindakan Lapangan	5
E. Tanggapan Mentor Lapangan	5
<b>BAB III. PENUTUP</b>	<b>8</b>
A. Kesimpulan	8

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Kadukabhat, Bupati-Diponegoro, Uluwu Supra, Fungsi dan Tugas serta Kewajiban Jabatan dan Fungsi, Sementara Kewajiban mempunyai tugas melaksanakan koordinasi administratif urusan kesehatan, budaya dan olahraga, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perencanaan dan rumah tangga Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sementara Kewajiban mempunyai fungsi:

- Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja kesehatan dan penyiangan: kerja-kerja teknis umum terpadu;
- Peleaksanaan tugas administrasi administratif;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
- Pengelolaan aset regional, keuangan, administratif dan kepegawaian;
- Pengelolaan rumah tangga dan perencanaan terpadu;
- Penyempurnaan prosedur, format dan prosedur kerja;
- Penyusunan data statistik dan lapangan;
- Peleaksanaan pelayanan umum di Kecamatan; dan
- Peleaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## B. Struktur Organisasi

Gambar 1.1  
Struktur Organisasi Sekretariat Kecamatan



Sekretariat Kecamatan terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Kemasyarakatan, Penerimaan Program dan Pelayanan.

Tugas dan Fungsi Sekretariat Kecamatan

### 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, termasuk tugas dan kepegawaian;
2. Selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas:
  - 1) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan administrasi lingkungan kecamatan;
  - 2) Pelaksanaan urusan umum tingkat kecamatan/kantor;
  - 3) Penyusunan rencana, pengelolaan dan pelayanan administrasi pemerintahan tingkat kecamatan;
  - 4) Penyelenggaraan inventarisasi kepegawaian sesuai di lingkungan kecamatan;
  - 5) Penyelenggaraan produksi, rumah dan pelayanan umum;
  - 6) Pengelolaan administrasi dan pelayanan kepegawaian di lingkungan kecamatan;
  - 7) Pelaksanaan uji tenaga kepegawaian.

- E) Rencana pelaksanaan kerja dan
- F) Rencana kerja-kerja dan yang berkaitan dengan Sistem Kejuruteraan

### 3. Sub-Dagelan Kejuruteraan, Penyediaan Program dan Pelaksanaan

- a. Sub-Dagelan Kejuruteraan, Penyediaan Program dan Pelaksanaan, merupakan tugas kejuruteraan administratif kejuruteraan perancangan dan pelaksanaan kejuruteraan Kejuruteraan.
- b. Dalam melaksanakan tugas untuk melaksanakan projek projek (T) Sub-Dagelan Kejuruteraan, Penyediaan Program dan Pelaksanaan merupakan tugas
  - 1) Penyediaan bahan dan pelaksanaan perancangan kejuruteraan kejuruteraan;
  - 2) Pelaksanaan perancangan administratif kejuruteraan Kejuruteraan;
  - 3) Penyediaan laporan perancangan kejuruteraan dan pelaksanaan perancangan kejuruteraan Kejuruteraan;
  - 4) Penyediaan bahan kejuruteraan perancangan kejuruteraan Kejuruteraan;
  - 5) Pelaksanaan data perancangan kejuruteraan kejuruteraan;
  - 6) Penyediaan bahan kejuruteraan perancangan kejuruteraan dan
  - 7) Pelaksanaan kejuruteraan dan yang berkaitan dengan Sistem Kejuruteraan

## AKUNTABILITAS KINERJA (AMK)

## A. Petajan Kinerja

Petajan Kinerja Sekolah Kesehatan Kecamatan Ponggo Kabupaten Ponggo Sulawesi yang telah ditetapkan dalam Rencana Operasional Kinerja Sekolah Kesehatan Kecamatan Ponggo Kabupaten Ponggo Tahun 2024 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.1

Target Kinerja Sekolah Kesehatan Kecamatan Ponggo tahun 2024

no.	sasaran kinerja	indikator kinerja	target
1.	Melaksanakan Peninjauan Program melalui dan Peningkatan Administrasi, Struktur dan Organisasi Kesehatan yang penguatan dan rumah tingkat Kesehatan	1. Persentase (%) pemenuhan Peninjauan- yang mendukung target kerja kecamatan	100%
		2. Persentase (%) Saluran dan Peningkatan Asesmen yang baik Ponggo	100%
		3. Persentase (%) Jumlah Kesehatan dan Peningkatan yang Struktur yang baik	100%
		4. Persentase (%) pemenuhan kepatuhan yang baik	100%

## B. Capaian Kinerja

Penghitungan capaian kinerja Sekolah Kesehatan Kecamatan Ponggo Kabupaten Ponggo Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan indikator yang sesuai indikator kinerja dengan cara dihitung dengan data yang mendukung dengan sasaran.

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Sekolah Kesehatan Kecamatan Ponggo Tahun 2024

Isi Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Melaksanakan Peninjauan Program melalui dan Peningkatan Administrasi, Struktur dan Organisasi Kesehatan	Persentase (%) pemenuhan Peninjauan- yang mendukung target kerja kecamatan	100%	100%	100%
	Persentase (%) Saluran dan Peningkatan Asesmen yang baik Ponggo	100%	100%	100%

Indikator dari UPRD DSDP Kotoran	Persepsi (%) Dukungan Persepsi dari Masyarakat yang sudah baik akan	100%	100%	100%
	Persepsi (%) Dukungan Masyarakat yang sudah baik akan	100%	100%	100%

### C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sarana Masyarakatnya Penyediaan Transportasi: analisis dan Pelaporan: Kebutuhan Air untuk keperluan, keuangan, perlengkapan dan tempat tinggal. Ketersediaan air dengan 4 (empat) indikator kinerja yaitu: **Persepsi (%) Dukungan Persepsi** untuk mendukung upaya jukdis dari tingkat, **Persepsi (%) Dukungan Persepsi** dari Masyarakat yang sudah baik, **Persepsi (%) Dukungan Persepsi** dan **Persepsi (%) Dukungan Persepsi** yang sudah baik dan **Persepsi (%) Dukungan Persepsi** yang sudah baik.

Indikator Capaian kinerja Persepsi (%) Dukungan Persepsi untuk mendukung upaya jukdis dan tingkat dengan capaian 100% masih tergolong Baik. Secara proses pelayanan Pemerintah Daerah yang berfokus antara lain gedung dan kendaraan yang sudah secara berkala. Daerah ini melaksanakan pengujian terhadap kondisi dan kualitas antara lain prosesnya di Kantor Kecamatan untuk keperluan pelayanan jukdis.

Indikator Capaian kinerja Persepsi antara antaranya Aparatur yang sudah baik dengan capaian 100% masih tergolong Baik. Secara proses pelayanan Pemerintah Daerah yang berfokus antara lain gedung dan kendaraan yang sudah secara berkala. Daerah ini melaksanakan pengujian terhadap kondisi dan kualitas antara lain prosesnya di Kantor Kecamatan untuk keperluan pelayanan jukdis.

Indikator Capaian kinerja Persepsi Dukungan Persepsi dan Persepsi yang sudah baik akan dengan capaian 100% masih tergolong Baik. Dukungan Persepsi, Penganggaran dan Eksekusi Kinerja Perangkat Daerah yang sudah baik. Laporan, Persepsi Kinerja, Persepsi Kinerja, Persepsi Kinerja dan Anggaran, Persepsi, DIPA (Dukungan Persepsi) Dukungan Persepsi dan Persepsi Persepsi Kinerja.

Indikator Capaian kinerja Persepsi (%) Dukungan Persepsi yang sudah baik dengan capaian 100% masih tergolong Baik. Dukungan Persepsi (Dukungan Persepsi) Dukungan Persepsi yang sudah baik dan pengujian untuk keperluan (Persepsi Persepsi, Persepsi Persepsi, Persepsi).

Berkas dengan akurabilitas keuangan Direktorat Keuangan Pemuda Kabupaten Ponorogo, penghitung diberikan pada page anggaran yang saat diupload dalam DPPA kemudian ditambahkan dengan nilai anggaran lain 2022 maka dapat dilihat gambaran umum nilai anggaran pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.6  
Rincian Anggaran dan Realisasi TA 2022

No.	Kegiatan	Anggaran		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Manajemen, Pengorganisasian dan Kualitas Kinerja Pemuda Karang	1.000.000	1.000.000	100%
2	Administrasi Keuangan Pemuda Karang Dasar	22.274.707.000	21.474.000.040	96,4%
3	Administrasi URM Pemuda Karang	273.000.000	272.000.000	99,7%
4	Pengelolaan Jasa Penyedia Jasa Pemukiman Dasar	5.340.000	5.333.000	99,7%
5	Penyediaan Barang dan Jasa Penyedia Jasa Pemukiman Dasar	20.000.000	19.771.000	98,8%
	<b>Jumlah</b>	<b>48.617.707.000</b>	<b>47.452.000.080</b>	<b>97,6%</b>

#### D. Rencana Kerja Lima Tahun

Rencana kerja lima tahun yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kecamatan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja lima tahun melalui pengisian dalam rangka Pengharmonisan program-program kerja Kecamatan dan pelaksanaan lima tahunan tepat waktu dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta meningkatkan kualitas pelayanan administrasi umum, surat-menyurat dan kepegawaian.

#### E. Tenggapan Akut Anggaran

Tenggapan dalam anggaran dalam Laporan Kinerja (LK) Sistem Keuangan Pemuda Kabupaten Ponorogo menggunakan metode pengisian dengan: Risiko kredit dapat memberikan suatu gambaran prestasi yang secara akurat, akurat metode ini penting dan fundamental, sehingga hal ini dapat meningkatkan keterlaksanaan dengan upaya Kerja Pemuda

Ruang Terpapar (Threat) Asam Lambung :

Lapisan kuring tebal

Lapisan esofagus baik

Lapisan otot baik

Respon otot yang

Cepatan otot yang

Lapisan Lapisan Sela baik

## BAB II PENGANTAR

### A. KEDIRYAJAN


Laporan Rincian (LR) Sekretariat Kecamatan Perungu Kabupaten Perungu membahas antiraggingkegiatan dan penggunaan anggaran untuk kegiatan dan melaksanakan anggaran dan kegiatan yang telah dilaksanakan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai standar dan etika.

Berkas/Lampiran hasil pengujian termasuk laporan kerja. Sekretariat Kecamatan Perungu Kabupaten Perungu tahun 2023 (2023-2024) semua meliputi semua memiliki laporan kerja dengan kriteria "BOK" (100%) dan laporan sesuai anggaran sebesar Rp. 0,00.

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan laporan sesuai kriteria pada tahun yang akan datang yaitu telah melakukan peningkatan dalam rangka Pengendalian prasyarat rencana kerja kecamatan dan perbaikan pelaksanaan saat ini dan sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku, serta meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi umum, surat-menyurat dan kepegawaian.

Perungu, 31 Desember 2023

Sekretaris Kecamatan Perungu

  
Lela Mulya Indah, S.TP, M.S.  
Pejabat (P/ta)  
HP: 9800130188812000

Mengantar,  
Kabupaten Perungu

  
Dhyandra A. Pribawanto, S.TP, M.S.  
Pejabat (P/ta)  
HP: 9800130188812000



**LAPORAN KINERJA (LKj)**

**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN  
KEPEGAWAIAN  
TAHUN 2025**



**KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2025**

## DAB1

### PERMBAHASAN

Laporan Kinerja (LK) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dibuat bertujuan untuk memberikan informasi yang terukur dan akurat tentang pelaksanaan dan pencapaian kinerja serta tindakan untuk upaya perbaikan kerja secara terus menerus dan berkelanjutan untuk peningkatan capaian kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai pedoman dan pertanggungjawaban atas apa yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang diuraikan dalam Rencana Kerja Tahun 2020.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian merupakan unsur esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan administrasi umum, salah satunya dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas diatas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Pengadaan dan pemberian administrasi umum dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- b. Pelaksanaan urusan umum lainnya dan kepegawaian;
- c. Penyusunan rencana, pengabdian dan pelayanan administrasi pemerintahan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan kepegawaian umum di lingkungan Kecamatan;
- e. Penyelenggaraan protokol, surat dan persiapan dinas;
- f. Pengadaan administrasi dan pelayanan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengabdian kepegawaian;
- h. Pelaksanaan administrasi umum lainnya;
- i. Pelaksanaan tugas umum lain yang ditugaskan Gubernur Kecamatan.

## AKUNTABILITAS KINERJA (AKUNTAS)

A. **Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Urutan dan Pengawasan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Pongkor sebagaimana terdapat dalam Nota Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Urutan dan Pengawasan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Pongkor Tahun 2021 tanggal 1 Oktober 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.1

Nota Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Urutan dan Pengawasan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Pongkor Tahun 2021

No	Jumlah Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Melaksanakan Pengawasan dan monitoring untuk Puncak Tinggi dan Aspirasi	1 jumlah Laporan Pengawasan dan Monitoring. Untuk Duk. 01 dan 1209 yang dilaksanakan	2 Laporan
		2 jumlah Laporan Pengawasan dan Monitoring untuk Kantor yang dilaksanakan	4 Laporan
		3 jumlah Peta Raster Luas Desa yang diterbitkan	1 Peta
		4 jumlah Laporan Pengawasan dan Monitoring dan Evaluasi SMPD	2 Laporan
		5 jumlah Laporan Pengawasan Desa dan Kelurahan untuk tahun yang termasuk ke Kabupaten Pongkor	2 LK
6 jumlah laporan Raker dan Raperdes untuk yang Terkoordinasi/terintegrasi	1 LK		

D. **Capaian Kinerja**

Capaian kinerja Kepala Sub Bagian Urutan dan Pengawasan dilakukan dengan cara melaksanakan semua target kinerja melalui monitoring indikator kinerja sesuai dan selanjutnya dengan data dan yang mendukung kinerja tersebut. Untuk melakukan proses ini, capaian kinerja akan secara menggunakan pendekatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 22  
 Status Pengadaan Tindakan Kinerja

Slur	Kategori Capaian	Kategori Laporan
4	Lebih dari 70 %	Sebagian Baik
3	50 % sampai dengan 70 %	Baik
2	30 % sampai dengan 50 %	Cukup
1	Kurang dari 30 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Laporan Sub-Sub-Program (dalam dan luar organisasi Tahun 2020) sebagai berikut:

Tabel 23  
 Capaian Kinerja Laporan Sub-Sub-Program Tahun dan Sub-Program Tahun 2020

Kategori Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Mempertahankan Penyelenggaraan Administrasi Internal, Khusus Khusus dan	Jumlah Laporan Penanganan dan Pemantauan, Tindakan Dampak dan lain-lain yang dilaksanakan	11	11	100%
Kecepatan dan Responsivitas	Jumlah Laporan Penanganan dan Pemantauan (dalam kantor yang diadopsi)	4.440.000	4.440.000	100%
	Jumlah Penerimaan Laporan dan Pengaduan yang diadopsi	1.700	1.700	100%
	Jumlah Penanganan Laporan Pemantauan dan Pemantauan	3.140.000	3.140.000	100%
	Jumlah Penanganan Pengaduan: Dalam dan Luar Kantor yang diadopsi dan diadopsi	2.100	2.100	100%
	Jumlah Penanganan Laporan dan Pengaduan dalam dan luar organisasi	1.100	1.100	100%

### C. EVALUASI DAN AKUISISI KONGSI

Contoh Sempurna: Pergeseran Administrasi Unsur, Rumus Tinggi dan Nyayaman Ruang dengan 6 tahun, indikator biaya yaitu, Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Kesehatan, Sistem Daya Air dan Listrik yang Disediakan, Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Pelayanan Unsur Kesehatan yang Disediakan, Jumlah Paket Bahan Logistik Kesehatan yang Disediakan, Jumlah Laporan Penyelenggaraan Ruang Kesehatan dan Kesehatan (RPH), jumlah Kesehatan Persewaan Deras dan Kesehatan Deras Jabatan yang disahkan dan disetujui Pagarin dan Jumlah Unsur Kesehatan dan Sempurna Lainnya yang Diperoleh/Disabilitas.

Indikator Capaian Kerja Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Kesehatan, Sistem Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan capaian 100% sesuai target BSK, Rencanan tidak, air dan energi dilakukan secara rutin setiap bulan.

Indikator Capaian Kerja Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Pelayanan Unsur Kesehatan yang Disediakan dengan capaian 100% sesuai target BSK, Rencana dan Pelayanan Unsur tidak ada yang tidak tercapai.

Indikator Capaian Kerja Jumlah Paket Bahan Logistik Kesehatan yang Disediakan dengan capaian 100% sesuai target BSK, Penyelidikan Logistik Kesehatan dan Penyelidikan tidak sesuai capaian/produksi kesehatan dan Tak Kesehatan dan Air Kesehatan.

Indikator Capaian Kerja Jumlah Laporan Penyelenggaraan Ruang Kesehatan dan Kesehatan (RPH) dengan capaian 100% sesuai target BSK, Ada Sempurna tepat kesehatan dan Kesehatan dan Listrik dan energi yang tidak ada Kesehatan Persewaan.

Indikator Capaian Kerja Jumlah Kesehatan Persewaan Deras dan Kesehatan Deras Jabatan yang disahkan dan disetujui Pagarin dengan capaian 100% sesuai target BSK, Kesehatan disahkan/tersebut yang diperlukan sesuai Luas kesehatan rata-rata.

Indikator Capaian Kerja Jumlah Sempurna/Kesehatan dan Sempurna Lainnya yang Diperoleh/Disabilitas dengan capaian 100% sesuai target BSK Kesehatan Persewaan tidak ada yang tidak tercapai untuk indikator penyelesaian Sempurna Kesehatan, tidak ada ya penyelesaian Rumus Deras Kesehatan Rencanan.

Berkas kerja memiliki volume fisik 500 Bagan 1000 Bagan, kemudian Pengerja 100000 Pengerja, sehingga diakhir pada tiap minggu yang akan diakhirkan akan 3000 kemudian diakhirkan dengan nilai anggaran tahun 2025 maka dapat dilihat gambaran secara visual anggaran pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4  
Rupa Anggaran dan Realisasi Anggaran TA 2025

No	Kategori	Anggaran		%
		Rencana Rp	Realisasi Rp	
<b>F</b>	<b>Administrasi Pemerintahan Daerah</b>			
1.	Pejabat dan non Pejabat s.d	11.000.000,00	11.400.000,00	104%
<b>G</b>	<b>Administrasi Umum Pemerintahan Daerah</b>			
1.	Pejabat dan non Pejabat s.d	10.000.000,00	10.000.000,00	100%
2.	Pejabat dan non Pejabat s.d	1.000.000,00	1.000.000,00	100%
3.	Pejabat dan non Pejabat s.d	1.000.000,00	1.000.000,00	100%
<b>H</b>	<b>Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah</b>			
1.	Pejabat dan non Pejabat s.d	11.400.000,00	11.400.000,00	100%
2.	Pejabat dan non Pejabat s.d	1.000.000,00	1.000.000,00	100%
3.	Pejabat dan non Pejabat s.d	1.000.000,00	1.000.000,00	100%
<b>I</b>	<b>Kelembagaan dan Pengembangan Pemerintahan Daerah</b>			
1.	Pejabat dan non Pejabat s.d	11.000.000,00	11.400.000,00	103%
2.	Pejabat dan non Pejabat s.d	1.000.000,00	1.000.000,00	100%
<b>Jumlah</b>		<b>34.000.000,00</b>	<b>34.800.000,00</b>	<b>102%</b>

#### D. Kemandirian Anggaran

Berkas kerja ini adalah yang yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi umum, untuk target dan terapan dari anggaran dengan dibelanjakan



**DAS II**  
**PENUTUP**

**A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja (LK) Badan IV Kesdag Urum dan Kependidikan Kecamatan Ponggo Kabupaten Ponggo sebagai hasil pertanggungjawaban atas Kinerja dan Kesdag Urum dan Kependidikan Kecamatan Ponggo Kabupaten Ponggo.

Berdasarkan hasil pengakuan pertanggungjawaban kinerja Sub Bagian Urum dan Kependidikan Kecamatan Ponggo Kabupaten Ponggo tahun 2021 tersebut semua indikator kinerja memiliki capaian kinerja dengan tingkat "baik" 100% dan capaian energi anggaran sebesar 95,57%.

Langkah selanjutnya yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu dengan meningkatkan koordinasi dengan seksi terkait agar pelayanan administrasi urum dan kependidikan (URU) dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan yang berlaku.

Ponggo, 01 Desember 2021

Mengatasii  
Direktur Kecamatan Ponggo



Lela Nurcaheni, S.STP, M.Si  
Pectina (Pia)  
NIP. 19600307198112003

Kesdag Urum dan Kependidikan  
Kecamatan Ponggo



De Winda, S.E  
Purnama Muli (Pili)  
NIP. 196004030198012019



**LAPORAN KINERJA (LKj)**  
**KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN,**  
**PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN**  
**TAHUN 2025**



**KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN PONOROGO**  
**TAHUN 2025**

Layanan Keuangan (JK) Kuala Selat Region Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan dibuat bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan lengkap mengenai dan memvisualisasikan realitas serta menyajikan data yang diperkuat dengan rencana dan perkembangan untuk pengalihan laporan keuangan. Selain itu juga bertujuan sebagai pemantauan dan pertanggungjawaban dan apa yang sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur publik yang ditunjukkan dalam Dasar Penyusunan Laporan Tahun 2022.

Selaku Region Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tujuan untuk memvisualisasikan administrasi keuangan, pemantauan dan pertanggungjawaban keuangan.

Dalam melaksanakan tugas diatas, Selaku Region Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan dan pelaksanaan pemantauan anggaran keuangan;
- b. Pelaksanaan pengalihan administrasi keuangan keuangan;
- c. Penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan pengalihan keuangan keuangan;
- d. Penyusunan bahan keuangan pemantauan keuangan kerja keuangan;
- e. Pengalihan data pertanggungjawaban laporan keuangan;
- f. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan laporan keuangan dan;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan keuangan.

## AKUNTABILITAS KEBERAKSIAN

## J. Penerimaan Kinerja

Penerimaan Kinerja Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Program dan Pelaporan Keuangan Perangkat Kabupaten Ponorogo sebagaimana terdapat dalam Rencana Penerimaan Kinerja Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Program dan Pelaporan Keuangan Perangkat Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 terdapat 1 Output 002 yang berikut sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

Rencana Penerimaan Kinerja Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Program dan Pelaporan Keuangan Perangkat Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Uraian Indikator Kinerja	Target
1.	Menyusun Perencanaan Anggaran Perencanaan Program dan Pelaporan di Lingkungan kerjanya	1. Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan Program dan Pelaporan terdapat	3 Dokumen
		1. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Maksimal Kinerja BOPC dan Laporan Realisasi Anggaran Perencanaan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Maksimal Kinerja BOPC	4 Dokumen
		2. Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan BOPC dan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan BOPC	4 Laporan
		1. Jumlah Laporan dan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan BOPC dan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan BOPC	4 Laporan

## E. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Program dan Pelaporan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi yang masing-masing indikator kinerja sesuai dan selisihnya dengan indikator yang selisihnya dengan sesuai. Untuk mengetahui penilaian target capaian kinerja setiap tahun, menggunakan penghitungan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 12  
Basis Pengukuran Capaian Kinerja

No	Indikator Capaian	Kategori Capaian
1	Lain dari 100%	Tinggi Rendah
2	75 % atau lebih dengan 100 %	Baik
3	50 % atau lebih dengan 75 %	Cukup
4	Kurang dari 50 %	Rendah

Adapun capaian kinerja Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Program dan Pelaporan Keuangan Periode Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 13  
Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Program dan Pelaporan Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	TARGET	REALISASI	Capaian
1	Mengaplikasikan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Pertanggung Jawaban Diteliti yang sesuai 100%.	3	3	100%
	Mengaplikasikan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai 100%.	4	4	100%
	Program dan Pelaporan & Lingkungan Keuangan	Kecepatan dan ketepatan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Realisasi Perencanaan Laporan Capaian Kinerja dan Monev Realisasi Kinerja SKPD.	11 Laporan	11 Laporan	100%
	Program dan Pelaporan & Lingkungan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Realisasi Anggaran dan Pelaporan Anggaran Tahun 2021	4	4	100%

### C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Secara Strategis, Perencanaan Administrasi Keuangan, perencanaan Program dan Pelaporan & Lingkungan Keuangan dicapai dengan 4 (empat) indikator kinerja yaitu Jumlah Laporan Pertanggung Jawaban Diteliti yang sesuai, Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Monev Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Realisasi Perencanaan Laporan Capaian Kinerja dan Monev

Realisasi Kinerja DTP, Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun DTP dan Laporan Hasil Realisasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun DTP dan Jumlah Dokumen Hasil Penyelidikan Administrasi Perkantoran Tugas KSN

Indikator capaian kinerja jumlah Dokumen Laporan Pemantauan Pengingat Daerah yang disusun dengan capaian 100%, sesuai dengan kategori Baik.

Dokumen Laporan pemantauan yang disusun adalah Capaian, Prosis, Peperjan Kinerja, Risiko, Risiko, ROP (Rencana Kerja dan Anggaran Pelaksanaan), DPA (Dokumen Pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran) dan Rencana Peperjan Kinerja. Dokumen dapat sebagai alat ukur kinerja sebagai dasar pemantauan, penganggaran dan pelaksanaan Keuangan Kecamatan Pamaranggi

Indikator capaian kinerja Jumlah Laporan Daerah Kinerja dan Militer Realisasi Kinerja DTP dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Militer Realisasi Kinerja DTP dengan capaian 100%, sesuai dengan kategori Baik.

Dokumen Laporan Capaian Kinerja serta Militer realisasi kinerja DTP yang dibuat saat ini ada 10, Laporan Capaian Kinerja Triwulan, 1000 LRP dan Laporan Program

Indikator Capaian Kinerja Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun DTP dan Laporan Hasil Realisasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun DTP dengan Capaian 100% sesuai dengan Baik. Dokumen Laporan Keuangan yang disusun adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Gambaran (L/G), Laporan Realisasi Triwulan (LRT), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Laporan keuangan ini merupakan pelengkap untuk penyediaan anggaran Keuangan Kecamatan Pamaranggi oleh pemerintah kota.

Indikator capaian kinerja Jumlah Dokumen Hasil Penyelidikan Administrasi Perkantoran Tugas KSN dengan capaian 100%, sesuai dengan kategori Baik. Dokumen Hasil Penyelidikan Administrasi Perkantoran Tugas KSN yaitu Dokumen prosedur (Instruksi Pejabat) Produk Kamban (PKB), Pejabat Pemantauan Anggaran (PP), Pejabat Pembelian Jasa (PPJ), Dokumen Pengukuran, Pengingat Pemantauan Kinerja

Berkas dengan struktur sebagai berikut: **Revisi SKD Sisa Anggaran Keuangan**, **Perubahan Program dan Kegiatan**, **Revisi Anggaran**, **Perubahan Anggaran** & **daftar** pada **laporan anggaran** yang telah ditetapkan dalam DPA, termasuk didalamnya dengan **revisi anggaran tahun 2025** maka dapat dilihat **perubahan** **anggaran** **revisi** **anggaran** pada **laporan** **anggaran**.

Tabel 2.6  
Rincian Anggaran dan Realisasi TA 2025

No	Objektif	Anggaran		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	<b>Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</b>	1.000.000	1.000.000	100
a.	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Daerah	1.000.000	1.000.000	100
b.	Keberhasilan Pelaksanaan Laporan Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama (IKU)	0	0	0
2.	<b>penyediaan keuangan Perangkat Daerah</b>	21.828.000	21.828.000	100,00
a.	Penyediaan Anggaran Pelaksanaan Tugas UGR	0	0	0
b.	Keberhasilan Pelaksanaan Laporan Keuangan Akhir Tahun DPA	0	475.000	0
	<b>Jumlah</b>	<b>22.828.000</b>	<b>22.828.000</b>	<b>100,00</b>

#### D. Rencana Kerja Langkah

Rencana kerja langkah dan upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang, yaitu meningkatkan efisiensi dan pemerataan dan dalam penyusunan. Adanya perencanaan dan anggaran, laporan keuangan, laporan kinerja yang akan kinerja sebagai kinerja DPA akan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu juga meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur melalui **minat dan pelatihan**, serta meningkatkan **akses dan prosedur** yang **menyumbang** **perkembangan** **kegiatan**.

## E. Tanggapan Mekanis Langsung

Tanggapan mekanis langsung (dari Laporan Kerja (LJ) Media Bilik Bagan Kejuruteraan, Penyelidikan Fizikal dan Pemodelan Mekanikal, Pemodelan Kinetik) menggunakan reka bentuk berikut.

Media tersebut dapat memberikan suatu gambaran tentang cara kerja alat, walaupun media ini praktikal dan terperinci, sehingga hal ini dapat menjelaskan keahluannya dengan tepat dan jelas. Pemodelan Mekanikal.

Ruang Tanggapan (Jawab) Mekanis Langsung

Laporan kerja Bilik

Laporan akhir Bilik

Laporan perbaiki

Pemodelan statik langsung

Pemodelan statik langsung

Lain-lain





**LAPORAN KINERJA (LKj)**  
**KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN**  
**TAHUN 2025**



**KECAMATAN PONGORO KABUPATEN PONGORO**  
**TAHUN 2025**

## PENDAHULUAN

Laporan Kinerja (LK) Kepala Badan Tata Pemerintahan dibuat bertujuan untuk memberikan informasi yang terukur dan obyektif mengenai dan memaparkan aktualitas serta kemajuan atau capaian kinerja serta rencana dan ketertarikan dengan pencapaian capaian kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai pedoman dari pertanggungjawaban atau apa yang sudah dilaksanakan sesuai dengan pokok-pokok judul yang dituangkan dalam Pokok-Pokok Laporan Kinerja Tahun 2020.

Badan Tata Pemerintahan merupakan badan penyelenggara urusan ketatanegaraan dan pemerintahan pemerintah penyelenggara pemerintahan umum, pemerintahan daerah/daerah serta pemerintah kabupaten dan pemerintahan lainnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Tata Pemerintahan mempunyai tugas:

1. Menyusun bahan dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa atau kelurahan;
2. Menyusun bahan berdasarkan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi umum dan tata kelurahan;
3. Menyusun bahan berdasarkan dan kebijakan berbagai sumber daya manusia dan pengorganisasian pemerintahan umum dan desa;
4. Menyusun bahan berdasarkan dan status persiapan pemerintahan penyelenggara dan pertanggungjawaban laporan dan dan pertanggungjawaban lainnya;
5. Menyusun bahan berdasarkan dan pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan bidang pemerintahan/keperawatan;
6. Pengumpulan dan bahan rangka administrasi pemerintahan ketertarikan;
7. Menyusun bahan berdasarkan dan pelaksanaan pemerintahan administratif pemerintahan dan administrasi umum;
8. Melakukan pelaksanaan upaya di bidang tata pemerintahan; dan
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

**A. Pelejanan Kinerja**

Pelejanan Kinerja Goals Sama Tiga Pemerintahan Kecamatan Pongkor Kabupaten Pongkor sebagaimana terdapat dalam Buku Pelejanan Kinerja Kapas Sama Tiga Pemerintahan Kecamatan Pongkor Kabupaten Pongkor Tahun 2021 dapat dijabarkan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.1

Goal Program Kerja Goals Sama Tiga Pemerintahan Kecamatan Pongkor Tahun 2021

No	Isu/Target Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas sistem Pemerintahan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemerintahan di Kecamatan serta Administrasi kecamatan dan Pelayanan / Kegiatan	1 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi/Inspeksi	2 Laporan
		2 Jumlah Kelurahan yang menyusun administrasi (SI Pelayanan) secara tepat waktu dan sesuai pembayaran anggaran	18.000
		3 Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Administrasi keuangan dengan baik dan baik	18.000
		4 Jumlah SPPT yang terpenuhi ke Kelurahan	18.000 SPPT

**B. Capaian Kinerja**

Capaian Kinerja Goals Sama Tiga Pemerintahan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan status masing-masing indikator kinerja sasaran dan diukur dengan data yang mendukung target sasaran. Untuk memberikan gambaran tingkat capaian kinerja akan disajikan, menggunakan penguraian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 10  
Basis Pengukuran Capaian Kinerja

No	Metrik Capaian	Kategori Capaian
1	Lampiran 100 %	Sangat Baik
2	75 % sampai dengan 95 %	Baik
3	50 % sampai dengan 75 %	Cukup
4	Kurang dari 50 %	Kurang

Alasan capaian kinerja Kepala Balai Tata Pemerintahan Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 11  
Capaian Kinerja Kepala Balai Tata Pemerintahan Tahun 2022

Aspek Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Kemampuan berkoordinasi antar-badan/instansi/kemahasiswaan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi tahunan	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Jumlah Kelembagaan yang menyetujui administrasi (SK, Perizinan) secara tepat waktu dan sesuai prosedur/undangan	10 Kelembagaan	10 Kelembagaan	100%
Kemampuan melaksanakan Administrasi Keuangan	Jumlah Kelembagaan yang melaksanakan Administrasi Keuangan dengan tepat dan baik	10 Kelembagaan	10 Kelembagaan	100%
	Jumlah SPPT yang disampaikan ke Kelurahan	34.000 SPPT	34.000 SPPT	100%

### C. Evaluasi dan Analisa Kinerja

Dasar Mengingatnya kontrol dalam Pelaksanaan Pekerjaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemerintahan di Kelurahan serta Administrasi kependudukan diarahkan dengan 4 (empat) indikator kinerja yaitu Jumlah Laporan Hasil Evaluasi tahunan, Jumlah Kelembagaan yang menyetujui administrasi (SK, Perizinan) secara tepat waktu dan sesuai prosedur/undangan, Jumlah Kelembagaan yang melaksanakan Administrasi Keuangan dengan tepat dan baik dan Jumlah SPPT yang disampaikan ke Kelurahan.

Indikator : Capaian kinerja Jumlah Akademi Lulusan Hasil Dukung ketahanan energi nasional 100% sesuai target. Laporan implementasi dibuat berdasarkan laporan hasil 14 Kabupaten di Kalimantan Tenggara.

Indikator : Capaian kinerja Jumlah Akademi Yang mempunyai administrasi (SK, Perizinan) sesuai target waktu dan sesuai penyediaan anggaran dengan capaian 100% sesuai target. Selain Tahun sesuai ketentuan hasil capaian administrasi (SK, Perizinan) sesuai target waktu dan sesuai penyediaan anggaran.

Indikator : Capaian kinerja Jumlah Akademi yang melaksanakan Administrasi keuangan dengan baik dan baik dengan capaian 100% sesuai target. Dengan adanya laporan monitoring dan evaluasi anggaran ketahanan dan dukungan bagi perbaikan administrasi keuangan lembaga keagamaan, agar tidak terjadi penyimpangan terhadap anggaran yang dibantu dan masing masing Akademi.

Indikator : Capaian kinerja Jumlah SPPT yang dilaksanakan ke Akademi dengan capaian 100% sesuai target. Pada saat tahun SPPT tahun sebelumnya dilakukan ke Akademi perwujudan ke Akademi ke Wali Pagar Selain ke Akademi juga dilakukan dan memelihara fasilitas kepada masyarakat agar memelihara perwujudan F&E sesuai pada target.

Berkaitan dengan stabilitas keuangan Kepala Desa Tala Pemerintahan, pengalangan dibuktikan pada yang anggaran yang bisa dibuktikan dalam DPPA kemudian dibuktikan dengan realisasi anggaran tahun 2021 yaitu dapat dilihat presentase capaian realisasi anggaran pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.4  
Rincian Anggaran dan Realisasi TA.2021

No.	Kegiatan	Anggaran		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Kegiatan Pelaksanaan Realisasi	1.000.000,00	1.000.000,00	100
2.	Bantuan Keuangan	1.000.000,00	1.000.000,00	100
3.	Kemampuan Urban/Percepatan Samsat	91.000.000,00	91.000.000,00	100
4.	Perencanaan Hasil Rancangan dan Konsultasi (RUC)	91.000.000,00	91.000.000,00	100

No.	Kategori	Anggaran	S.
	Jumlah	12.000.000,00	100%

### B. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dan upaya yang dilaksanakan untuk mengetahui hasil serta latar yang akan datang serta pemantauan lanjutan agar pemantauan ini dapat pemantauan diukur dengan menggunakan hasil yang telah dilaksanakan melalui Rencana Kerja Monev (RKM) Komite nasional untuk dan provinsi.

### C. Tanggapan Akademi Lapangan

Tanggapan Akademi lapangan telah (pemerintah RI) Akademi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Kabupaten Pangaja Kabupaten Pangaja menggunakan hasil pemantauan diukur. Akademi diukur dapat mengetahui hasil pemantauan hasil secara akurat, walaupun metode ini masih dan tidak akurat sehingga hal ini dapat merupakan keterbatasan dengan tujuan (akademi Pangaja).

#### Ruang Tanggapan (Tanggapan Akademi Lapangan)

Laporan yang baik

Laporan tidak baik

Laporan yang baik

Hasil yang tidak baik



Classroom



Upper South Side  
Museum  
& Library

**K. KESIMPULAN**

Uraian Khasa 343 Hama Saka Tak Perantaraan sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja dan Akuntabilitas Tak Perantaraan Kecamatan Pongkor Kabupaten Pongkor.

Sementara hasil pengkajian pengamatan melalui uraian Khasa Saka Tak Perantaraan Kecamatan Pongkor Kabupaten Pongkor tahun 2021, diperoleh secara kumulatif kinerja tersebut adalah sesuai dengan standar BAK 100% dan standar kinerja regional sebesar 90,0%.

Langkah selanjutnya yang dapat untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu dengan meningkatkan kualitas aparatur pemerintah serta dengan pemenuhan dukungan sumber kependidikan sesuai standar yang ditetapkan melalui Standar Daya Negeri (SDN) sesuai hasil temuan dan pemantauan.

Pongkor, 31 Desember 2021

Kasab Tak Perantaraan  
Kecamatan Pongkor



Siprius Haryanto, S.Pd  
Kasab Tak Perantaraan  
Kecamatan Pongkor

Mejabat  
Kasab Pongkor



Siprius Haryanto, S.Pd, M.Pd  
Kasab Tak Perantaraan  
Kecamatan Pongkor



## LAPORAN KINERJA (LKj)

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
TAHUN 2025



KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2024

Layanan E-Service (ES) Secara Perencanaan Masyarakat dapat membantu memberikan informasi yang mudah dan cepat aksesnya. dan merupakan alternatif yang terbaik untuk upaya perbaikan masa depan dan keberlanjutan untuk pembangunan bangsa. Selain itu juga terdapat sebagai pemecutan dan penguat penguatan dan apa yang sudah dilaksanakan menjadi salah satu syarat utama yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Tahun (RPJ).

Salah Perencanaan Masyarakat merupakan upaya perbaikan dalam berbagai dan melaksanakan program pemerintahan, pembangunan, politik serta peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

Dalam melaksanakan upaya perbaikan, Salah Perencanaan Masyarakat mempunyai langkah:

1. Perbaikan dalam dalam rangka perbaikan pemerintahan, pemerintahan masyarakat dan demokrasi;
2. Perbaikan dalam berbagai dan pelaksanaan pelayanan publik perbaikan dan perbaikan rakyat;
3. Perbaikan dalam berbagai pemeliharaan program dan fasilitas umum;
4. Perbaikan dalam berbagai dan pelaksanaan pelayanan publik dan program yang inovatif;
5. Perbaikan dalam berbagai dan pelaksanaan pelayanan publik dan berbagai lain berbagai;
6. Perbaikan dalam berbagai pemertanian pembangunan legal nasional;
7. Perbaikan dalam berbagai dan pelaksanaan pelayanan publik; dan;
8. Perbaikan dalam berbagai dan pelaksanaan pelayanan dalam upaya membangun peran aktif masyarakat dalam pembangunan dan pengendalian pemerintahan Inggris;
9. Pelaksanaan perbaikan upaya di bidang pembangunan masyarakat dan
10. Pelaksanaan upaya upaya lain yang diberikan oleh Citra





dengan mendapatkan rekening ke 18 Kabupaten pada saat pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kelurahan (Dinas yaitu Kabupaten).

Indikator Kinerja Utama (IKU) Fasilitas Jalan Tengah Pemukiman Perumahan Perkotaan dengan Capaian 100% masuk kategori Baik. Selain itu ini yang dilakukan adalah dengan mendapatkan rekening ke 18 Kabupaten pada saat pelaksanaan kegiatan musrenbang yang telah di akui oleh Kabupaten.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Fasilitas Jalan Tengah Program dan Pelaksanaan Pemeliharaan Masyarakat Desa dengan Capaian 100% masuk kategori Baik. Selain itu ini dilakukan dengan jalan melakukan kegiatan pemeliharaan yang sebelumnya di dan melalui yang memiliki syarat akan kegiatan di tingkat Kabupaten.

Indikator Kinerja Utama Laporan Fasilitas Pengembangan Jalan Desa Masyarakat dengan Capaian 100% masuk kategori Baik. Selain itu yang dilakukan adalah dengan mendapatkan rekening ke 18 Kabupaten dengan pelaksanaan pemeliharaan POC di Kabupaten.

Terdapat dengan diwujudkan sebagai Kapasitansi Pemeliharaan Masyarakat Kabupaten Pematang Jaya dengan dilakukan pada saat anggaran yang akan dilakukan dalam DPPN dilakukan diwujudkan dengan melalui anggaran tahun 2020 pada saat akan dilakukan kegiatan melalui anggaran pada saat kegiatan terakir.

Tabel 2.2  
Rincian Anggaran dan Realisasi TA 2020

No.	Kegiatan	Anggaran		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Fasilitas Telekomunikasi dan Pemeliharaan Perumahan dan Masyarakat Pemukiman Desa			
a.	Pengadaan Infrastruktur Pemukiman Desa (Jalan, Saluran Air, Pemukiman Perumahan Perkotaan dan Desa)	4.000.000,00	4.000.000,00	100
b.	Fasilitas Pemukiman Program dan Pelaksanaan/Pemeliharaan Masyarakat Desa	34.700.000,00	34.700.000,00	100,04
	<b>Jumlah</b>	<b>38.700.000,00</b>	<b>38.700.000,00</b>	<b>100,07</b>

#### D. Menanamkan Layat

Demam tidak tinggi dan cepat yang disebabkan untuk menggalakan biaya pada tahun yang akan datang yaitu menggalakan sumber-sumber perantara dan dalam perusahaan lainnya, untuk memberikan modal modal pada waktu dan menggalakan secara langsung ke sumber dan dalam perusahaan lain yang sudah ada atau lagi ada.

#### E. Tanggapan Ahli Lapangan

Tanggapan ahli lapangan dalam Laporan Kerja (LK) Rapid Risk Penilaian Masyarakat Terhadap Persepsi Kemampuan Persepsi masyarakat untuk penilaian tingkat risiko kesehatan dapat memberikan nilai gambaran tingkat kerja secara akurat, sehingga risiko ini perlu dan berdasarkan strategi ini ini dapat membantu keterlambatan dengan cepat.

##### Rang Tanggapan Ahli Lapangan

Laporan Kerja baik

Laporan Kerja baik

Laporan Kerja

Realisasi Kerja yang

Capaian Kerja yang

Lain-lain: \_\_\_\_\_

**DAFTAR  
PENGESAHAN**

**A. KESIMPULAN**

Laporan Penyelidikan (LP) Tahun Baru Persekitaran Masyarakat Komuniti Persekitaran Persekitaran sebagai wujud perancangan/pemilihan oleh warga dan Pegawai Setia Persekitaran Masyarakat Komuniti Persekitaran Persekitaran.

Sehubungan dengan pengiraan pencapaian warga Setia Persekitaran Masyarakat Komuniti Persekitaran Persekitaran tahun 2023, sebagai bentuk komitmen warga menjadi sahsa warga dengan kelainan (10%) dan mencapai dengan pengiraan sekitar 95.97%.

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kerja pada tahun yang akan datang, yaitu dengan melibatkan lagi pemerkahan dan dalam penyusunan dokumen. Selain penyelesaian masalah masalah yang ada, maka akan meningkatkan usaha marketing ke beberapa bank dalam penyelesaian masalah masalah sebagai laporan PIR ini.

Persekitaran, 21 Disember 2023

Pegawai Setia Persekitaran  
Masyarakat Komuniti Persekitaran



Arda Hana Puzihsari, S.E., W.B.  
Pegawai Tugasan (PTG)  
NIP. 198202102011012003

Mengapakah  
Garis Persekitaran



Nur Hafidha Nur Hafidha, S.E.P., M.S.  
Pegawai Tugasan (PTG)  
NIP. 19770221000111001



**LAPORAN KINERJA (LKj)**  
**KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN**  
**KETERTIBAN UMUM**  
**TAHUN 2025**



**KECAMATAN PONOROSO KABUPATEN PONOROSO**  
**TAHUN 2025**

## BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja (LK) Badan Saku Kementerian dan Kawasan Utara dibuat bertujuan untuk memberikan informasi yang terdapat dan capaian kinerja, dan menunjukkan stabilitas serta ketahanan untuk upaya perbaikan dan inovasi dan berkesinambungan untuk pencapaian capaian kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai acuan dan pertimbangan dalam upaya yang telah dilaksanakan kepada setiap pejabat publik yang ditugaskan dalam Badan Penyelenggara Kerja Tahun 2021.

Badan Saku Kementerian dan Kawasan Utara mempunyai tugas memonitor, menilai, dan melaksanakan pembinaan kearah kerja, penitipan dan berbagai urusan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Saku Kementerian dan Kawasan Utara mempunyai tugas:

1. Menyusun bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kearah kerja, penitipan dan berbagai urusan;
2. Penyusunan data, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan dan keadaan yang menyangkut kearah kerja dan kearah kerja;
3. Penyusunan bahan koordinasi dengan BOPD dan instansi lain (Poli dan TNI) serta penanda upaya kerjasama dengan dan kegiatan penitipan kearah kerja dan kearah kerja;
4. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan penitipan dan penitipan dan berbagai urusan;
5. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan penitipan kegiatan dan penitipan, dalam rangka kearah kerja;
6. Pelaksanaan kegiatan penitipan penitipan;
7. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan penitipan dalam rangka Penitipan Kerja di Kawasan.

- E. Penyusun telah melakukan dan melakukan penelitian dengan IKTI  
sementara itu yang bekerjasama dalam bidang penelitian dan pengajaran  
jurnal-jurnal yang terdapat;
- F. Pelaksanaan yang efektif akan sangat menunjang kelangkaan pengajaran  
kemudian;
- G. Penyusun telah melakukan dalam rangka penelitian, antara lain untuk  
meningkatkan dan mengetahui tentang perkembangan masyarakat dalam  
penanggulangan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dan  
kemudian masyarakat;
- H. Pelaksanaan pengajaran telah dilakukan oleh Dosen;
- I. Pengajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode dan pendekatan umum;
- J. Pelaksanaan penelitian secara vertikal dengan tujuan untuk mencari Pengetahuan Baru  
Kebudayaan Baru;
- K. Pelaksanaan juga juga telah yang dilakukan oleh Dosen.

### A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Kepala Sekolah Kantorbaner dan Karyawan Umum Kecamatan Tembung Kabupaten Tembung sebagaimana terdapat dalam Revisi Peraturan Kinerja Kepala Sekolah Kantorbaner dan Karyawan Umum Kecamatan Tembung Kabupaten Tembung Tahun 2021 akan disajikan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.1  
Revisi Perjanjian Kinerja Kepala Sekolah Kantorbaner dan Karyawan Umum  
Kecamatan Tembung Tahun 2021

No	Isi Perjanjian Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya keaktifan dalam melaksanakan pembinaan terhadap lembaga, organisasi, dan lembaga masyarakat serta pengabdian sosial lembaga terkait dengan	1. Jumlah kunjungan yang diwujudkan pengabdian kelompok Terpadu	10 kali
		2. Jumlah kunjungan yang diwujudkan Pengabdian Masyarakat	5 kali
		3. Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan dengan Tindak Apas dan Tindak Melanjutkan	4 Laporan

### B. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Kepala Sekolah Kantorbaner dan Karyawan Umum Tahun 2021 dilakukan dengan cara mendeskripsikan secara lengkap mengenai realisasi kinerja secara dan mendukung dengan data kuantitatif yang mendukung dengan secara. Untuk memberikan gambaran tingkat capaian kinerja setiap indikator, menggunakan pengisian angka-persentase tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
Basis Pengukuran Capaian Kinerja

Kategori	Kategori Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 70 %	Sangat Baik
3	16 % sama dengan 50 %	Baik
2	25 % sama dengan 10 %	Cukup
1	Kurang dari 10 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Program Sektoral Kementerian dan Pemerintah Menurut Tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
Capaian Kinerja Program Sektoral Ditata Kelola Kementerian dan Pemerintah Menurut Tahun 2022

Sektor Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya koordinasi dalam melaksanakan pelayanan kesehatan keluarga, peningkatan dan ketahanan masyarakat serta pengendalian dampak negatif dari bencana serta bencana	Jumlah Kegiatan yang diwujudkan program-program Terpadu	18 kali	18 kali	100 %
	Jumlah Kegiatan yang diwujudkan Program Koordinasi	18 kali	18 kali	100 %
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Takah Agency dan Takah Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan	100 %

### C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Berikut ini rangkuman capaian kinerja dalam melaksanakan pelayanan kesehatan keluarga, peningkatan dan ketahanan masyarakat serta pengendalian dampak negatif dari bencana dengan target (Tgt) indikator kinerja yaitu Jumlah Kegiatan yang diwujudkan program-program Terpadu, Jumlah Kegiatan yang diwujudkan Program Koordinasi, Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Takah Agency dan Takah Masyarakat.

Indikator Capaian Kinerja Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan (mengikuti Laporan Tahunan dengan Capaian 100% sesuai subcapaian). Pelaksanaan semua program terdistribusi sesuai hari pelaksanaan untuk mencapai kualitas Tertentu/laya sesuai dengan syarat.

Indikator Capaian Kinerja Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan (melakukan dengan Capaian 100% sesuai dengan Sub. Perencanaan yang dilakukan untuk hari Perencanaan dengan target tertentu (berg) di bawah yang terdistribusi oleh syarat, kemudian (mengikuti) pada suatu periode (pengertian) untuk kegiatan dengan terdistribusi, kemudian terdistribusi.

Indikator Capaian Kinerja Jumlah Laporan Pelaksanaan (memantau) Halangan dengan Tidak Apres dan Tidak Mampu dengan Capaian 100% sesuai dengan Sub. Perencanaan yang dilakukan untuk hari Disposisi dan Audien Tidak Apres. Perencanaan Sosial Forum Komunikasi Tidak Apres dan Mampu (FOPB).

Indikator dengan karakteristik sebagai Kapas Teknik Sementara dan Fasilitas Umum (kemampuan) Ramping, pengalangan di bawah pada apa-apa yang telah dilakukan. Selain DPPA, kemudian dilakukan dengan jumlah anggaran tahun 2021 tidak dapat dilihat prosesnya karena melalui anggaran pada label sebagai berikut.

Tabel 2.4  
Rincian Anggaran dan Realisasi TA 2021

No.	Kegiatan	Anggaran		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Koordinasi upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat			
4.	memantau Halangan dengan Tidak Apres dan Tidak Mampu	10.000.000	10.000.000	100
	<b>Jumlah</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100</b>

#### D. Monev dan Evaluasi Lanjut

Demikian hasil kerja dan upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang pada meningkatkan kualitas kinerja pelayanan. Untuk itu, instansi terkait dan melakukan sehingga pelaksanaan dan kegiatan lainnya di bawah ini merupakan (kemampuan) Ramping dan lain-lain.

### C. Tanggapan Masyarakat Lingkungan

Tanggapan masyarakat lingkungan dalam Laporan Kinerja (LJK) Revisi Suku Kesehatan dan Kesehatan umum kecamatan Perunggi Kabupaten Perunggi menggunakan metode penemuan masalah. Metode tersebut dapat membantu untuk gambaran masalah nyata secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terapan di lapangan, sehingga ini ini dapat membantu dalam memahami tingkat Laju Demografi Perunggi.

Ruang Tanggapan (Dapensi) masalah lingkungan

Capaian kurang baik

Capaian sudah baik

Capaian buruk

Realisasi tidak tercapai

Capaian tidak tercapai

Capaian Capaian sudah baik namun  
Peningkatan Kesehatan & Stabilitas  
& Lingkungan hidup masyarakat

## A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LK) Kepala Desa Kecamatan dan Kelurahan untuk etnografi kuantitatif pengunggahan data kinerja dan Laporan Desa Kecamatan dan Kelurahan Tahun Anggaran Perangka Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan hasil pengujian persamaan melalui ujieta Kepala Desa Kecamatan dan Kelurahan Tahun Anggaran Perangka Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 secara umum nilai ketepatan hasil ujieta dengan tingkat ketepatan 100% dan tingkat ketepatan anggarannya 100%

Langkahselanjutnya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja yaitu lebih yang akan datang yaitu dengan meningkatkan inovasi dalam Kecamatan, Desa dan Kelurahan sehingga Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2023 dapat Kecamatan Ponorogo lebih maju dan terampil

Ponorogo, 31 Desember 2022

Masyarakat  
Kabupaten Ponorogo

Dedy Kholayati S.SW, M.S.  
Ketua Bpkdes 1 (1/2)  
NIP. 1970122198811001

Kepala Kecamatan dan Kelurahan  
Untuk Kecamatan Ponorogo

Antri Purwati S.S, S.H.  
Ketua (1/4)  
NIP. 19711012000121008



## LAPORAN KINERJA (LKj)

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
TAHUN 2025



KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2025

## DAB1

### PENDAHULUAN

Layanan *Waktu OK* (Waktu Setia Keajaiban Masyarakat) dibuat bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu, dan merupakan alternatif serta bantuan untuk upaya pemeliharaan serta pemenuhan dan keberlanjutan untuk peningkatan upaya kerja. Selain itu juga berfungsi sebagai pemantau dan penanggungjawab atas apa yang sudah dilaksanakan menjadi salah satu syarat wajib yang dituangkan dalam Rencana Pekerjaan Umum Tahun/2021.

Setelah Keajaiban Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan hubungan dan pemantauan penjabaran kepedulian masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Setia Keajaiban Masyarakat mempunyai tugas:

1. Menyusun bahan dalam rangka pemantauan penjabaran kepedulian masyarakat;
2. Menyusun bahan: koordinasi dalam pemantauan atau pengkajian layanan sosial termasuk bantuan bencana alam;
3. Menyusun bahan: koordinasi dan pelaksanaan pemantauan dalam upaya pengintegrasian kerangka kerja dan pelaksanaan;
4. Menyusun bahan: koordinasi dan pemantauan pemantauan di bidang pendidikan, kesehatan, dan juga pemberdayaan perempuan, pemberdayaan anak dan kelompok lainnya;
5. Menyusun bahan: koordinasi dan pelaksanaan pemantauan di bidang kesehatan, gizi dan pemberdayaan pemakai rumah;
6. Pelaksanaan pemantauan tugas di bidang kepedulian masyarakat dan;
7. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Camat.



Tabel 2.1  
Capaian Kinerja Karyawan pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2020

Aspek Kinerja	Indikator Kinerja	TARGET	Realisasi	Capaian
Kemampuan Karyawan	jumlah karyawan yang memiliki kemampuan khusus	1000000	1000000	100%
	jumlah karyawan yang memiliki kemampuan khusus	1000000	1000000	100%
Kemampuan Karyawan	jumlah karyawan yang memiliki kemampuan khusus	1000000	1000000	100%
	jumlah karyawan yang memiliki kemampuan khusus	1000000	1000000	100%
Kemampuan Karyawan	jumlah karyawan yang memiliki kemampuan khusus	1000000	1000000	100%
	jumlah karyawan yang memiliki kemampuan khusus	1000000	1000000	100%
Kemampuan Karyawan	jumlah karyawan yang memiliki kemampuan khusus	1000000	1000000	100%
	jumlah karyawan yang memiliki kemampuan khusus	1000000	1000000	100%

### C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Salah satu indikator kinerja adalah melaksanakan penilaian kinerja karyawan perusahaan manufaktur dengan menggunakan 5 (lima) indikator kinerja yaitu jumlah karyawan yang memiliki kemampuan khusus. Penilaian Kinerja Karyawan yang memiliki kemampuan khusus yaitu jumlah karyawan yang memiliki kemampuan khusus. Jumlah karyawan yang memiliki kemampuan khusus yaitu jumlah karyawan yang memiliki kemampuan khusus. Jumlah karyawan yang memiliki kemampuan khusus yaitu jumlah karyawan yang memiliki kemampuan khusus.

Salah satu Capaian Kinerja adalah kemampuan yang memiliki kemampuan khusus. Penilaian Kinerja Karyawan yang memiliki kemampuan khusus yaitu jumlah karyawan yang memiliki kemampuan khusus. Jumlah karyawan yang memiliki kemampuan khusus yaitu jumlah karyawan yang memiliki kemampuan khusus. Jumlah karyawan yang memiliki kemampuan khusus yaitu jumlah karyawan yang memiliki kemampuan khusus.

Salah satu Capaian Kinerja adalah kemampuan yang memiliki kemampuan khusus. Penilaian Kinerja Karyawan yang memiliki kemampuan khusus yaitu jumlah karyawan yang memiliki kemampuan khusus. Jumlah karyawan yang memiliki kemampuan khusus yaitu jumlah karyawan yang memiliki kemampuan khusus. Jumlah karyawan yang memiliki kemampuan khusus yaitu jumlah karyawan yang memiliki kemampuan khusus.

Indikator Capaian Kinerja: Jumlah event yang diadakan sesuai dengan Rencana ISKT RI sehingga Capaian 100% sesuai target baik. Selain itu akan diadakan event ISKT RI kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pangoan akan sesuai Rencana ISKT RI sesuai visi Bupati Sijunjung, Upacara peringatan Pahlawan, dan Timbalan Kecamatan & Peringkat Kecamatan Pangoan.

Indikator Capaian Kinerja: Jumlah Halaman Seri Balok yang akan tercapai Capaian 100% sesuai target baik. Hal yang akan diadakan yaitu akan diadakan kegiatan pameran Rencana Hari Jadi Pangoan. Grading Sijunjung.

Indikator Capaian Kinerja: Jumlah Peta akan yang akan tercapai target 10 peta terdistribusi 10 Peta sehingga Capaian 100% sesuai target baik. Masih banyak Kelurahan di Kecamatan Pangoan akan menerima Peta Kelurahan akan dan akan diadakan kegiatan kerja baik dan penting lainnya.

Indikator Capaian Kinerja: Jumlah Peta akan yang akan tercapai target 10 peta terdistribusi 10 Peta sehingga Capaian 100% sesuai target baik. Masih banyak Kelurahan di Kecamatan Pangoan akan menerima Peta Kelurahan akan dan akan diadakan kegiatan kerja baik dan penting lainnya.

Berkaitan dengan anggaran anggaran Pemasok Solid Kebutuhan Masyarakat perhitungan di bawah ini yang akan tercapai yang telah ditetapkan dalam DPR kemudian akan diadakan anggaran realisasi anggaran tahun 2021 maka dapat dilihat prosesnya sebagai berikut anggaran pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1

Realisasi Anggaran dan Realisasi TA 2021

No	Kegiatan	Anggaran		%
		Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Realisasi Penganggaran Kegiatan Perencanaan di tingkat Kecamatan			
2	Realisasi Diferusi Peta Kelurahan Perencanaan di Tingkat Kecamatan	4.100.400	4.101.000	99,9
	<b>Jumlah</b>	<b>4.100.400</b>	<b>4.101.000</b>	<b>99,9</b>

#### D. Rencana Tidak Lepas

Rencana tidak lepas dari upaya yang dilaksanakan untuk memperoleh kinerja pada tahun yang akan datang yaitu dengan memperoleh kualitas Sumber



## K. KESIMPULAN

Laporan ini telah selesai dan diharapkan dapat bermanfaat bagi Pembaca. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen dan Pembaca yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat berharga.

Demikianlah kami mengakhiri proses penulisan laporan ini. Kami berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi Pembaca. Terima kasih.

Lampiran yang terdapat dalam laporan ini adalah sebagai berikut, yaitu berupa lampiran hasil dari Survei Daya Saing (SDS) melalui Surat dan Feature dan merupakan analisis awal mengenai kondisi awal dan rencana masa depan dari perusahaan yang bersangkutan. Untuk itu, kami berharap semoga dapat bermanfaat bagi Pembaca dan semua pihak yang terkait.



Logo  
Guru Besar

Survei Daya Saing (SDS) 2023  
Periode Triwulan I 2024  
NIP. 067012210011100

Periode, 31 Desember 2023

Karya Tulis Ilmiah  
Keuangan

Survei Daya Saing  
Periode Triwulan I 2024  
NIP. 06700210011100



## LAPORAN KINERJA (LKj)

KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM  
TAHUN 2025



KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2026

## BAB I

### PENDAHULUAN

Layanan Siswa (LS) Negeri Soko Polyantra Uluwatu dibuat sebagai salah satu bentuk layanan yang terdapat dalam Kurikulum, dan merupakan salah satu bentuk layanan yang terdapat dalam Kurikulum dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas siswa. Selain itu juga berfungsi sebagai pemantau dan bertanggungjawab atas apa yang sudah dilaksanakan sesuai dengan yang terdapat dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018 tentang Kurikulum, Standar Kompetensi, dan Tujuan, Fungsi dan Tujuan Kurikulum, Soko Polyantra Uluwatu mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan

Dalam melaksanakan tugas di atas Soko Polyantra Uluwatu mempunyai tugas:

- a. Menyusun bahan-bahan dengan cara-cara yang mendukung pelaksanaan pembelajaran di kelas;
- b. Menyusun bahan-bahan yang mendukung Standar Pelayanan RPP,
- c. Melakukan kegiatan pembelajaran dan pemeliharaan keadaan-keadaan pelayanan;
- d. Melakukan upaya pengabdian pelayanan;
- e. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekolah.

## AKUNTABILITAS KEBERHAJATAN

## 2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Pongor Kabupaten Pongor dilaksanakan sebagai salah satu Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Pongor Kabupaten Pongor Tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut ini:

Tabel 2.1  
Rencana Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pelayanan Umum  
Kecamatan Pongor Tahun 2025

No.	Isi Perjanjian Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum sebagai kerangka keorganisasian	1. Jumlah Jumlah Pegawai Purnakarya yang diberikan	100%
		2. Jumlah SOP yang diberikan	100 SOP
		3. Pemetaan Unit Keorganisasian Purnakarya yang diberikan pada setiap awal SOP	100%
		4. Jumlah Dokumen Perjanjian Kerja yang diberikan (ke 31 Tahun yang diberikan)	1 Dokumen
		5. Jumlah Dokumen Perjanjian Kerja yang diberikan	200 Dokumen
		6. Jumlah Dokumen Perjanjian Kerja yang diberikan PIP	100 Dokumen
		7. Jumlah Dokumen Perjanjian Kerja Keorganisasian yang diberikan (ke 31 Tahun yang diberikan)	1 Dokumen
		8. Jumlah Dokumen Perjanjian Kerja Keorganisasian yang diberikan (ke 31 Tahun yang diberikan)	100 Dokumen
		9. Jumlah Dokumen Perjanjian Kerja / yang akan diberikan keorganisasian	11 Dokumen
		10. Jumlah Dokumen Perjanjian Kerja Keorganisasian yang diberikan (ke 31 Tahun yang diberikan)	1 Dokumen



Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1 tentang Perubahan Peraturan	20	21	2021
Jumlah Laporan Keuangan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku di Wilayah Maluku	41 tahun	4 tahun	2021

### C. EVALUASI DAN ANGGARAN KINERJA

Selama pelaksanaan kegiatan dalam melaksanakan Anggarannya pemerintah akan terus dengan menggunakan informasi dengan dengan 70 (tujuh puluh) indikator kinerja yaitu Jumlah Bandar Pelayanan Publik yang diterbitkan, Jumlah SOP yang diterbitkan, Perincian Surat Perencanaan, Perintah / Dukung yang diterbitkan setiap tahun untuk SOP, Jumlah Dokumen Pengajuan HK yang diterbitkan lebih dari 1 tahun yang diterbitkan, Jumlah Dokumen Pengajuan TK yang diterbitkan, Jumlah Perincian Dokumen dan Rincian RT/RT, Jumlah Dokumen Pengajuan Rinc Perincian Perincian, lebih dari 1 tahun yang diterbitkan, Jumlah Dokumen Pengajuan Aktif Perincian Perincian yang masih terkumpul dalam Rinc Perincian dan Database Koordinasi yang diterbitkan, Perincian Dokumen Pengajuan Rinc / Dukung yang diterbitkan, Perincian dan Jumlah Laporan Keuangan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku di Wilayah Maluku.

Indikator Capaian Kinerja Jumlah Dokumen Bandar Pelayanan Publik (BPP) yang diterbitkan dengan capaian 100% untuk setiap tahun. Dokumen Bandar Pelayanan Publik (BPP) Perincian yang diterbitkan dengan capaian 100%.

Indikator Capaian Kinerja Jumlah Bandar Dokumen Perincian (DP) yang diterbitkan dengan capaian 100% untuk setiap tahun. Dokumen Bandar Dokumen Perincian (DP) Perincian yang diterbitkan:

1. DP tentang Perincian Surat Masuk
2. DP tentang Perincian Surat Keluar
3. DP tentang Surat perintah atau Keluaran
4. DP tentang Surat perintah atau Keluaran
5. DP tentang Surat perintah Dukung atau Keluaran
6. DP tentang Surat perintah Dukung atau Keluaran
7. DP tentang Pengajuan Perincian / Fasilitas umum
8. DP tentang Dukung Perincian Perincian

#### E. SOP tentang Perolehan Kartu Keluarga (KK)

##### 10. SOP tentang Mekanisme Perolehan Elektronik dan Manual KTP-el

##### 11. SOP tentang Proses dan Mekanisme Pendaftaran Nomor 3.1 Tahun

##### 12. SOP tentang Pelayanan Atas Namalok Perilaku yang masih terdapat dalam Kartu Keluarga dan Data base Kependudukan

Indikator Capaian Kinerja Perolehan Perolehan Elektronik (Data) yang diukur berdasarkan waktu SOP dengan capaian 100% untuk kategori Baik. Semua administrasi pelayanan terdapat masyarakat terlaksana dengan baik, lancar dan tepat waktu sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Indikator Capaian Kinerja Jumlah Dokumen Pengajuan MK yang produktif (11 Tahun) yang diukur dengan capaian 1100% untuk kategori Baik. Semua administrasi pelayanan terdapat masyarakat terlaksana dengan baik, lancar dan tepat waktu sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Indikator Capaian Kinerja Jumlah Dokumen Pengajuan (11) yang diukur dengan capaian 100% untuk kategori Baik. Semua administrasi pelayanan terdapat masyarakat terlaksana dengan baik, lancar dan tepat waktu sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Indikator Capaian Kinerja Jumlah Perolehan Elektronik dan Manual KTP-el dengan capaian 100% untuk kategori Baik. Semua administrasi pelayanan terdapat masyarakat terlaksana dengan baik, lancar dan tepat waktu sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Indikator Capaian Kinerja Jumlah Dokumen Pengajuan Atas Namalok Perilaku (11 Tahun) yang diukur dengan capaian 1100% untuk kategori Baik. Semua administrasi pelayanan terdapat masyarakat terlaksana dengan baik, lancar dan tepat waktu sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Indikator Capaian Kinerja Jumlah Dokumen Pengajuan Atas Namalok Perilaku yang masih terdapat dalam Kartu Keluarga dan Database Kependudukan yang diukur dengan capaian 100% untuk kategori Baik. Semua administrasi pelayanan terdapat masyarakat terlaksana dengan baik, lancar dan tepat waktu sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Indikator Capaian Kinerja Pelayanan Dokumen Pengajuan (11) yang diukur berdasarkan Waktu Pelayanan dengan capaian 100% untuk kategori Baik. Semua administrasi pelayanan terdapat masyarakat terlaksana dengan baik, lancar dan tepat waktu sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Indikator Capaian Kinerja Penguasaan Laporan Indeks Kualitas Masyarakat (IKM) dengan capaian 100% sesuai target. Saat Laporan Indeks Kualitas Masyarakat telah direspon ke Bantul melalui Badan Operasional Akuntansi Daerah Kabupaten Pongkor dengan nilai 97,33.

Berkaitan dengan keterlambatan Anggaran Resmi Sekelompok Urusan, pengalangan 4 desember pada masa anggaran yang telah ditetapkan dalam DPAK kemudian ditambatkan dengan melampaui anggaran tahun 2020 maka dapat dilihat penerapan capaian realisasi anggaran pada tahun sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Rincian Anggaran dan Realisasi TA 2020

No.	Kategori	Anggaran		%
		Dikawat (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	2	3	4	5
1.	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang tidak diserahkan oleh unit/fans. Penguasaan Daerah yang ada di Kabupaten			
	4. Fasilitas Penguasaan anggaran Realisasi Penguasaan Kinerja di Kabupaten	1.000.000	1.000.000	100
	<b>Jumlah</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100</b>

#### D. Rencana/Indeks Kinerja

Perencanaan kinerja kerja dan upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu meningkatkan kemampuan SDM dan optimalisasi pelayanan, serta melakukan upaya pemeliharaan dan di dapat masyarakat dapat diwujudkan target kinerja sesuai dengan Rencana Operasional Penguasaan (ROP) dan meningkatkan kinerja dan penerapan yang optimal.

#### E. Tanggapan/Isian Langsung

Tanggapan atas tanggapan dalam Laporan Kinerja (LK) Akuntabilitas dan Pelayanan Urusan Akuntansi Rencana Kabupaten Pongkor menggunakan media profilur standar. Standar standar yang memberikan suatu perhatian

prosedur kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan sederhana, akan tetapi hal ini dapat mengakibatkan ketidakakuratan dengan Lapis Dermal Forming.

#### Ruang Terpapar Dermal, Masam Lembut

Lapisan kulit tak

Lapisan kulit tebal

Lapisan epitel

Permak kulit yang

Capsul kulit yang

Lapisan Lapisan Kulit yang tebal  
Iti lapisan kulit yang tebal  
Iti lapisan kulit yang

**S&P  
PENUTUP**

**A. RINGKASAN**

Laporan Kinerja (LK) 2020 (dan Perencanaan Strategis Keuangan Perang) Kabupaten Perang sebagai wujud pertanggungjawaban dan kinerja dari Kepala Desa Perencanaan Masyarakat Kecamatan Perang Kabupaten Perang.

Selama tahun berjalan pencapaian kinerja Kepala Desa Perencanaan Masyarakat Kecamatan Perang Kabupaten Perang tahun 2020 adalah sesuai rencana kerja yang disusun dengan kinerja 84,8770% dan capaian kinerja anggaran sebesar 83,37%.

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu dengan meningkatkan peran pemangku adat dalam pengelolaan danang perkebunan masyarakat terutama pada waktu dan mengelola volume produksi ke kabupaten dan akan melanjutkan RENCANA KEBERHASILAN dengan target 70% nya.

Perang, 31 Desember 2020.

Kepala Desa Perencanaan  
Masyarakat Kecamatan Perang



Agus Nova Pusdianet, S.S., M.H.  
Pembina Tingkat II (P2)  
NIP. 19620319211002010

Wakil Kepala Desa  
Perang



Agus Nova Pusdianet, S.S.P., M.S.  
Pembina Tingkat II (P2)  
NIP. 197703211960110001